



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK



LAPORAN TAHUNAN

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

TAHUN 2023



Besti

"Bekerja Sepenuh Hati"



I.b Gambaran Umum Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM TAHUN 2023

Penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing memerlukan beberapa faktor penting seperti Infrastruktur, Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Regulasi yang baik. Transportasi laut di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari sistem transportasi yang melayani sebagian besar wilayah pulau – pulau yang tersebar luas di Indonesia dan juga penghubung antar Negara. Transportasi laut memegang peran penting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Laporan Tahunan ini berfungsi sebagai sarana dan penyampaian informasi tentang kegiatan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan merupakan pertanggungjawaban Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.

Laporan Tahunan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok ini disusun untuk menggambarkan informasi secara singkat namun komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dimana secara umum merupakan program-program yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 1.1

Peta lokasi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok



Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terletak pada $6^{\circ}6'29''$ LS $106^{\circ}52'49''$ BT yang berada di area pelabuhan tersibuk di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintahan di bidang kebandaran, perkapalan dan jasa maritim dalam lingkungan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok bertugas untuk mengatur pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai standar nasional dan internasional.

Keberadaan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok memiliki peran vital dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Dimana Pelabuhan Tanjung Priok memiliki posisi yang begitu penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional yaitu sebagai pintu gerbang konektivitas ekonomi nasional dan internasional. Daerah lingkungan kerja yang termasuk dalam lingkup Kesyahbandaran Tanjung Priok meliputi perairan pelabuhan dengan batas-batas, yakni :

06° - 07' - 15" LS - 106° - 49' - 18" BT;
06° - 04' - 00" LS - 106° - 51' - 18" BT;
06° - 04' - 00" LS - 106° - 55' - 18" BT;
06° - 06' - 05" LS - 106° - 55' - 18" BT.

Gambar I. 2

Peta Alur Pelayaran dan Zona Labuh di Pelabuhan Tanjung Priok



Setiap Instansi baik itu Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta memiliki tujuan Organisasi yang ingin dicapai oleh para pelaksana instansi tersebut. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan dimaksud, diperlukan evaluasi dan program kerja yang berguna sebagai acuan didalam pencapaian tujuan dimaksud.

Untuk memperoleh gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok maka perlu disusun suatu laporan yang dapat memberikan uraian secara rinci tentang kegiatan yang menjadi Program Kerja, Realisasi dari Program Kerja dimaksud maupun kegiatan yang diprogramkan namun belum dapat dilaksanakan serta menyusun Program Kerja (PROKER) tahun berikutnya.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan data kegiatan dan data laporan selama Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Maksud dari penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diembannya serta menginformasikan keberhasilan yang telah dicapai dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.

Hal-hal yang belum dapat dicapai dan dilaksanakan perlu dianalisa apa yang menjadi kendala untuk dicarikan upaya untuk mengatasi masalah dan kendalanya, sedangkan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan perlu di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Tujuan disusunnya laporan tahunan ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan beban tugas yang diembannya, sekaligus dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana serta program kerja dan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pada tahun berikutnya.

II. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

A. Tugas Pokok Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung Jawab kepada Menteri Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok mempunyai Tugas di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta berkoordinasi kegiatan Pemerintah di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada wilayah Kerja Pelabuhan.

B. Fungsi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

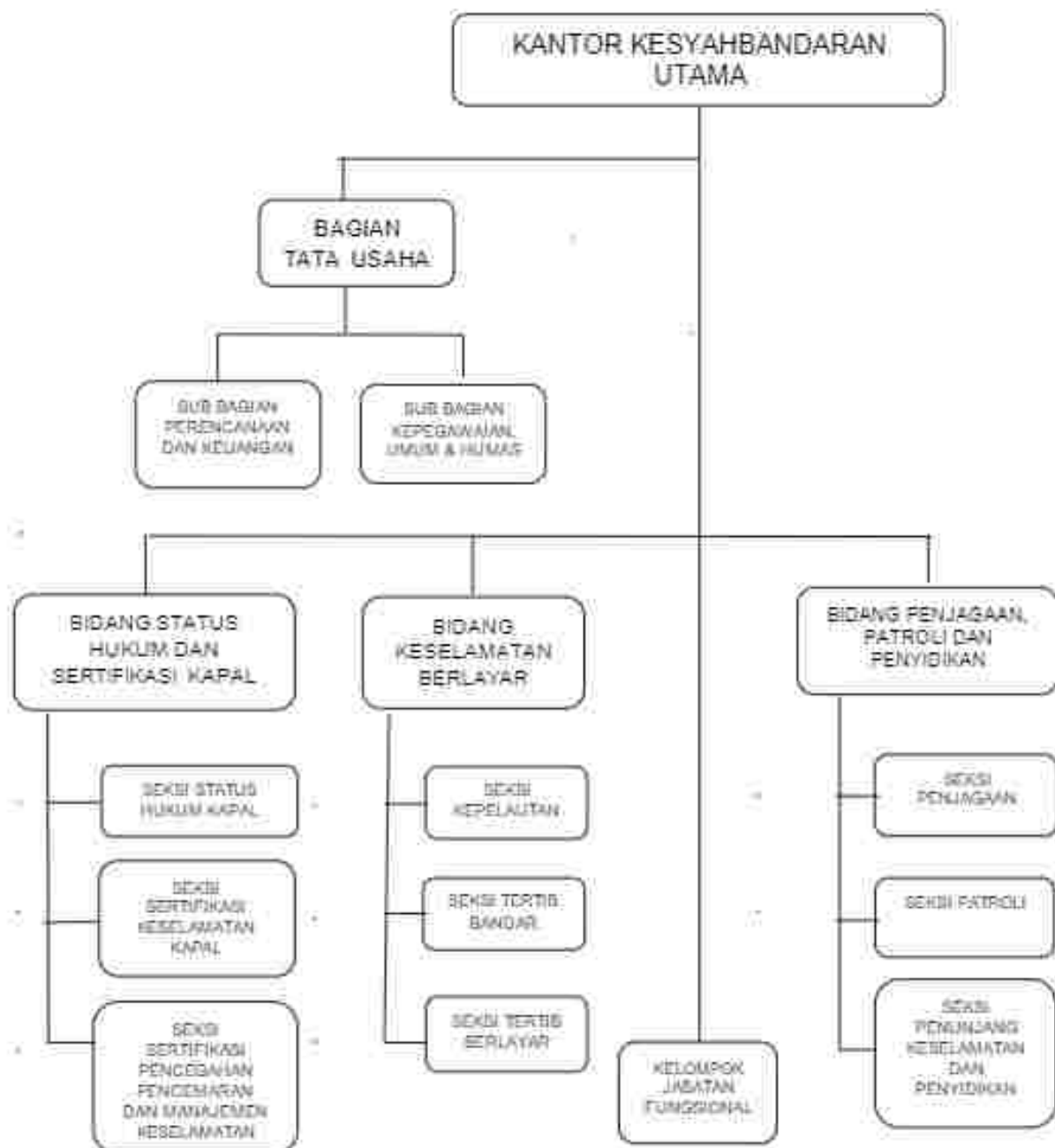
Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengawasan dan pemenuhan Kelaiklautan kapal, Keselamatan Keamanan dan Ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- b. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan Alur pelayaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat diperairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air pemanduan dan penundaan kapal
- d. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. Penegakkan hukum di bidang keselamatan berlayar dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan berlayar dan keamanan pelayaran; dan
- i. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

III. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok digambarkan sebagai berikut :

Gambar I. 3
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA SESUAI PM. 34 TAHUN 2012





Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana disebutkan di atas Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terdiri dari :

- A. Bagian Tata Usaha;
- B. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- C. Bidang Keselamatan Berlayar; dan.
- D. Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan

A. BAGIAN TATA USAHA

1. Tugas Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama.

2. Fungsi Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2012 pasal 5 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. Pengola urusan keuangan pelaporan sistem akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum; dan
- d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

BAGIAN TATA USAHA, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, anggaran, dan penyusunan laporan evaluasi kinerja, serta pengelolaan urusan keuangan, pelaporan sistem akuntansi instansi (SAI) dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

2) Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum serta pertimbangan dan bantuan hukum, dan hubungan masyarakat.

B. BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL**1. Tugas Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal**

Mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal, serta penempatan status hukum kapal.

2. Fungsi Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2012 pasal (9), Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hiptotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan;
- b. Pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal;
- d. Pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal ; dan
- f. Penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal;

BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL terdiri atas :

- a. Seksi Status Hukum Kapal;
- b. Seksi Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal;
- c. Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal;

1) Seksi Status Hukum Kapal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar.

2) Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar serta penyiapan bahan penerbitan sertifikat pelabuhan.

3) Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengujian peralatan, verifikasi, penyiapan bahan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersih tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

C. BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR

1. Tugas Bidang Keselamatan Berlayar

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

2. Fungsi Bidang Keselamatan Berlayar

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang keselamatan berlayar menyelenggarakan fungsi;

- a. Penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;



- b. Peyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal;
- c. Pelaksanaan pengawasan tertib Bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal;
- d. Pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- e. Pelaksanaan penerbitan surat persetujuan berlayar; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan kapal asing (port state control) dan flag state control

BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR, terdiri atas:

- a. Seksi Kepelautan;
- b. Seksi Tertib Bandar; dan
- c. Seksi Tertib Berlayar;

1) Seksi Kepelautan

Mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, peyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal.

2) Seksi Tertib Bandar

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengawasan tertib Bandar, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan.

3) Seksi Tertib Berlayar

Mempunyai tugas melakukan pengawasan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (port state control), flag state control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

D. BIDANG PENJAGAAN, PATROLI DAN PENYIDIKAN

1. Tugas Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan

debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan bantuan pencairan dan penyelamatan (search and rescue/SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code/ ISPS- Code), pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

2. Fungsi Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 17, bidang penjagaan , patroli dan penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertiban emberkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan;
- b. pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dan pengisian bahan bakar , limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi;
- c. pelaksanaan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan,kapal sandar dan berlabuh;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan serta pengawasan perlindungan lingkungan maritime;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan , salvage dan pekerjaan bawah air;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (internasional ship and port facility security code/ ISPS- Code);
- g. Penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal; dan

- h. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BIDANG PENJAGAAN, PATROLI DAN PENYIDIKAN, terdiri atas:

- a. Seksi Penjagaan;
- b. Seksi Patroli; dan
- c. Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan.

1. Seksi Penjagaan

Mempunyai tugas melakukan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi.

2. Seksi Patroli

Mempunyai tugas melakukan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (search and rescue / SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadam kebakaran di perairan pelabuhan.

3. Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan

mempunyai tugas melakukan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (Internasional Ship and Port Facility Security Code / ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan serta penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang undangan



IV. KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2023

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 280 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 39 orang Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai berikut:

A. APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1. Berdasarkan Golongan

Jumlah Personil yang ada di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat dalam Tabel I.1.

Tabel I.1
Personil Menurut Golongan

NO	Golongan	A	B	C	D	JUMLAH
1	Golongan IV	15	3	-	1	19
2	Golongan III	43	78	57	51	229
3	Golongan II	2	7	2	21	32
4	Golongan I	-	-	-	-	-
Total						280

(sumber data urusan kepegawaian bulan januari sampai dengan oktober 2023)



2. Berdasarkan Pendidikan Umum

Sebaran pendidikan personil pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat pada Tabel IV. 2.

Tabel I. 2
Personil Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT IJAZAH	JUMLAH
1	Doktor (S3)	1
2	Magister (S2)	31
3	Sarjana (S1)	119
4	Diploma 4 (D4)	13
5	Diploma 3 (D3)	20
6	SLTA	100
7	SLTP	3
8	SD	0
	Total	287

(sumber data urusan kepegawaian bulan Januari sampai dengan Oktober 2023)



3. Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat

Jumlah pegawai yang telah mengikuti jenjang pendidikan struktural dan fungsional seperti pada tabel I. 3

Tabel I. 3.
Personil yang telah mengikuti diklat

NO	TINGKAT UJAZAH	JUMLAH
1	PKN	3
2	PKA	1
3	PKP	9
4	Penanggulangan Pencemaran	4
5	Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal	1
6	Pengukuran Kapal	10
7	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	11
8	Marine Inspector	56
9	Kesyahbandaran	46
10	PSCO	11
11	Pengawasan Barang Berbahaya	5
12	Penanggulangan pencemaran di Laut	7
NO	TINGKAT UJAZAH	JUMLAH



13	TTPL Pratama	4
14	TTPL Madya	2
15	PPNS	10
16	ISPS CODE	6
17	ISM CODE	12
18	IMGD Course	6
19	Dasar KPLP	5
20	Bintara KPLP	3
21	Perwira KPLP	2
22	Dasar Dasar Kesyahbandaran	21
23	Penyelam	3
24	IMO Oil Pollution	1
25	T.O.T	19
26	Basic Commercial Survey	2
27	Penyelenggara Pelabuhan dan Otoritas	-

(sumber data urusan kepegawaian bulan januari sampai dengan oktober 2023)

4. Jumlah Pegawai Menurut Umur



Pembagian usia personil pada Kantor Kesyahbandara Utama Tanjung Priok, seperti pada tabel I. 4:

Tabel I. 4.
Personil berdasarkan umur

NO	USIA	JUMLAH
1	<25	8
2	26 - 30	4
3	31 - 35	14
4	36 - 40	39
5	41 - 45	55
6	46 - 50	41
7	51 - 55	89
8	56 Tahun Keatas	41
	Total	287

(sumber data urusan kepegawaian bulan januari sampai dengan oktober 2023)

5. Menurut Jenis Kelamin



Pembagian jenis kelamin personil pada Kantor Kesyahbandara Utama Tanjung Priok, seperti pada tabel 1.5 :

Table 1. 5.
personil berdasarkan jenis kelamin :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	LAKI - LAKI	239	
2	PEREMPUAN	48	
	TOTAL	287	

[sumber data urusan kepegawaian bulan januari sampai dengan oktober 2023]

B. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)



1. Berdasarkan Pendidikan Umum

Sebaran pendidikan Umum personil Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat pada Tabel I. 6.

Tabel I. 6.
Personil PPNPN Menurut Ijazah

NO	TINGKAT IJAZAH	JUMLAH
1	Sarjana (S1)	5
2	D4	1
3	D3	1
4	SLTA	18
5	SLTP	2
6	SD	4

(sumber data urusan kepegawaian bulan januari sampai dengan oktober 2023)



2. Menurut Jenis Kelamin

Pembagian jenis kelamin personil PPNP pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat pada tabel 1. 7.

Tabel 1. 7
Personil PPNP berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)
1	LAKI – LAKI	28
2	PEREMPUAN	3
TOTAL		31

(sumber data urusan kepegawaian bulan januari sampai dengan oktober 2023)



V. KEUANGAN KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK TAHUN ANGGARAN 2023

A. ANGGARAN :

Jumlah Anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 bulan Januari sampai dengan Oktober 2023 seperti pada tabel 1.8

Tabel 1.8
Anggaran yang tersedia dan realisasinya

TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
2023 Januari s/d Oktober	51.815.787.000	42.947.601.771	8.868.185.229

**B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) :**

Jumlah Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun Anggaran 2023 seperti pada tabel 1.9

Tabel 1. 9
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Januari s/d Oktober 2023

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
1	Penerimaan Jasa Perkapaian dan Kepelautan	11.713.138.000	13.158.751.042	112 %
2	Penerimaan Jasa Kenavigasian	38.080.581.000	38.684.203.701	102 %
TOTAL		49.793.719.000	52.102.858.555	105 %



C. DATA BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN DINAS DAN KAPAL NEGARA PATROLI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Tabel I. 10
Data Kendaraan Dinas dan Kapal Negara Patroli
Januari s/d Oktober 2023

NO	Jenis Barang	Volume	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	18	Unit	
2	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Unit	
3	Kendaraan Dinas Roda 2	42	Unit	
4	Kapal Negara Patroli Kelas 3	1	Unit	
5	Kapal Negara Patroli Kelas 4	2	Unit	1 Unit dalam Proses penghapusan BMN
6	Kapal Negara Patroli Kelas 5	2	Unit	
7	Kapal <i>Rigid Inflatable Boats</i> (RIB)	2	Unit	



BAB II

BAGIAN TATA USAHA

I. PROGRAM

A. Kegiatan Pemerintahan

1. Renovasi / Rehabilitasi Gedung Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
2. Evaluasi Kinerja
3. Audit Surveillance Iso 9001:2015
4. Audit Surveillance Iso 37001
5. Penyusunan Laporan Tahunan
6. Rekonsiliasi PNBP TW I
7. Bimtek Aplikasi Si Tampan
8. Sosialisasi Aplikasi E-Persuratan
9. Rekonsiliasi PNBP dan Rekonsiliasi SAI
10. Rekonsiliasi PNBP TW III
11. Penataan Administrasi Kepegawaian dalam penerapan Aplikasi E-Kinerja

B. Kegiatan Operasional

1. Sumpah ASN
2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Payroll Package
3. Apel dan Penandatanganan Kontrak Kerja PPNP
4. Peresmian Gedung dan Launching Aplikasi "SI TAMPAN"
5. Vaksinasi Booster

II. REALISASI

A. Kegiatan Pemerintah

1. Renovasi / Rehabilitasi Gedung

Dalam rangka memberikan pelayanan serta kinerja terbaik pegawai Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok maka perlu dilaksanakan perawatan gedung Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pengguna jasa serta untuk menunjang kinerja pegawai sehari-hari

Gambar II.1
Renovasi Gedung SAR KPLP



(Sumber Gambar Tim Rumahtangga Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

Gambar II.2
Renovasi Lapangan Bulu Tangkis



(Sumber Gambar Tim Rumahtangga Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok "Siap Bertransformasi Menuju Organisasi yang Agile, Adaptif, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Profesional", Selasa (07/02).

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan melatih kekompakan serta kerjasama antar pegawai, maka dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 03 s.d. 05 Februari 2023 di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi dengan mengusung tema "Siap Bertransformasi Menuju Organisasi yang Agile, Adaptif, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Profesional".

Pada kesempatan yang sama dilaksanakan juga pemberian penghargaan kepada para pegawai teladan "Employee of The Month". Diharapkan pemberian penghargaan ini dapat memberikan motivasi dan semangat kerja bagi para pegawai serta menjadi contoh kepada pegawai yang lainnya untuk selalu meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa

Gambar II.3
Evaluasi Kinerja



3. Audit Surveillance Iso 9001:2015

Senin (17/07) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Audit Eksternal ISO 9001:2015 yang dipimpin oleh Bapak Ihsan Maskuri selaku auditor eksternal dari PT. LRQA Business Assurance and Inspection Services Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Mutu. Focus audit eksternal ini adalah untuk memastikan kembali apakah ada perubahan terhadap sertifikasi maupun system manajemen yang ada di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok selama satu tahun belakangan ini. Lalu melakukan verifikasi terhadap system manajemen secara berkelanjutan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok serta melakukan review terhadap efektifitas tindakan pencegahan atas temuan ketidaksesuaian sebelumnya.

Dengan dilakukannya Audit Eksternal ini Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015.

Gambar II.4

Audit Surveillance Iso 9001:2015



(Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

4. Audit Surveillance Iso 37001

Jumat (14/07) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Audit Eksternal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bapak Achmad Mustanir Mufti, ST., MM selaku auditor eksternal dari Badan Sertifikasi International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) beliau melakukan audit pada tiap Bidang dan Bagian.

ISO 37001:2016 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang membantu organisasi mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menangani penyuapan. Manfaatnya adalah sebagai panduan pencegahan penyuapan dan bukti dalam penyelidikan bahwa organisasi telah mengambil langkah untuk mencegahnya.

Gambar II.5

Audit Surveillance Iso 37001



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

5. Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan

Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2022, maksud dan tujuan kegiatan ini sebagai media pertanggung jawaban kegiatan rutin operasional, kegiatan berbasis anggaran dan kegiatan

penunjang selama tahun anggaran 2022, Dokumen Laporan Tahunan 2022 ini disusun agar terdokumentasi seluruh jumlah output layanan dan dapat digunakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat disempurnakan pada tahun mendatang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Ibu Lusi Andayani, S.T., M.M.Tr bertempat di Royal Padjajaran Hotel Bogor pada 7 s.d 9 Maret 2023.

Gambar II.6

Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

6. Rekonsiliasi PNBPTW I

Dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan PNBPTW yang akuntabel diperlukan adanya rekonsiliasi dalam menyusun laporan realisasi PNBPTW. Maka dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan I di Hotel Aston Imperial Bekasi pada Rabu (5/4). Kegiatan ini di buka langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Capt. Weku Frederik Karuntu,, M.M. didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Lusi Andayani, S.T., M.M.Tr. Dalam sambutannya Capt. Weku menyampaikan bahwa Pentingnya laporan PNBPTW yang berkualitas melalui mekanisme rekonsiliasi adalah saat dilakukan pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun

pemeriksaan PNBP oleh Auditor Independen, rekonsiliasi yang akurat terhadap laporan PNBP adalah kunci pada saat laporan PNBP tersebut diperiksa. Karena PNBP merupakan dokumen penerimaan negara setiap rupiah yang tertera harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Capt. Weku berharap Kegiatan rekonsiliasi ini dapat dijadikan momentum bagi para operator aplikasi untuk menjadi operator yang profesional sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang Akurat, Akuntabel, dan menjadikan kegiatan rekonsiliasi ini sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi berkinerja-nya seluruh komponen di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Gambar II.7

Rekonsiliasi PNBP TW I



(Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

7. Bimtek Aplikasi SI TAMPAN

Bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, diselenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Pelayanan (SI TAMPAN) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Bimbingan Teknis ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kecepatan, akurasi data, dan transparansi pelayanan melalui aplikasi tersebut. SI TAMPAN adalah aplikasi yang digunakan untuk mendigitalisasi seluruh layanan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, mulai dari permohonan hingga produk akhir. Aplikasi ini dirancang sebagai "ready to integrate" yang dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi pemerintahan terkait. Aplikasi ini telah diintegrasikan dengan SIK Kemenhub untuk melakukan profiling admin dan operator SI TAMPAN, serta aplikasi kapal.dephub.go.id untuk mengidentifikasi data kapal pemohon. Bimbingan Teknis ini berlangsung pada tanggal 12 Juni 2023 dan acara ini dibuka oleh Capt. Weku Frederik Karuntu selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan dihadiri oleh pejabat struktural, staff perwakilan, dan stakeholder.

Gambar II.8

Bimtek Aplikasi SI TAMPAN



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

8. Sosialisasi Aplikasi E-Persuratan

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok mengadakan kegiatan Penataan Administrasi Perkantoran Persuratan Sosialisasi Aplikasi E-Persuratan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan digitalisasi sistem administrasi perkantoran

dengan menerapkan aplikasi e-persuratan di lingkungan kementerian perhubungan. Sebanyak 40 peserta hadir dalam acara ini, terdiri dari Pegawai Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan 2 perwakilan dari Kantor KSOP Kelas II Marunda. Kegiatan ini dipimpin dan dibuka oleh Capt. Weku F. Karuntu, selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dalam sambutannya beliau menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan melalui pemanfaatan teknologi yang semakin pesat. Narasumber pada kegiatan ini dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan dengan memberikan paparan dan sharing pengalaman dalam implementasi e-persuratan. Diharapkan dengan acara ini, seluruh karyawan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat langsung menerapkan aplikasi e-Persuratan sebagai sarana pengelolaan administrasi perkantoran yang modern, efisien, dan efektif dalam mendukung kemajuan Penataan Persuratan tersebut. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 26 s.d. 27 Juli 2023, di Swiss-BelHotel Bogor.

Gambar II.9
Sosialisasi Aplikasi E-Persuratan



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

9. Rekonsiliasi PNB dan Rekonsiliasi SAJ

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Capt. Weku Frederik Karuntu, M.M. secara langsung membuka Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan

Negara-Bukan Pajak (PNBP) dan SAI Tingkat Wilayah UAPPA/B-W Semester I TA 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel 101 Tugu Yogyakarta dan di hadiri oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan data valid terkait pagu belanja dan pendapatan, realisasi belanja dan pendapatan dan aset yang meliputi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 yang kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023.

Gambar II.10

Rekonsiliasi PNBP dan Rekonsiliasi SAI



(Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

10. Rekonsiliasi PNBP TW III

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi PNBP Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Pada 18 s.d 20 Oktober 2023, Capt. Weku selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok membuka kegiatan rekonsiliasi data PNBP periode April s.d. September 2023, kegiatan ini bertujuan memastikan keandalan dalam laporan PNBP.

Fokusnya adalah pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Rekonsiliasi yang akurat dianggap kunci. Selain itu, kegiatan ini untuk mendorong operator aplikasi untuk profesionalisme dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kegiatan ini berlangsung pada 18 s.d. 20 Oktober 2023 di Royal Safari Garden, Bogor.

Gambar II.11

Rekonsiliasi PNBPN TW III



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

11. Penataan Administrasi Kepegawaian dalam penerapan Aplikasi E-Kinerja dalam penerapan Aplikasi E-Kinerja

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian dalam penerapan Aplikasi E-Kinerja. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan kinerja sumber daya manusia dengan melibatkan 309 pegawai. Mereka siap melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 254 Tahun 2022.

Kegiatan ini mencakup beberapa tahap pengelolaan kinerja, seperti perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian kinerja, dan tindak

lanjut hasil penilaian kinerja pegawai. Selama kegiatan ini, para narasumber memberikan pemahaman tentang tata cara pengisian aplikasi E-Kinerja kepada para pegawai. Aplikasi E-Kinerja akan diberlakukan pada bulan November, dan narasumber diharapkan untuk terus mendampingi kegiatan ini sampai selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja sumber daya manusia dalam rangka mencapai keberhasilan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Hal ini penting untuk memastikan kinerja pegawai yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 s.d. 26 Oktober 2023 di di Orchard Hotel Industri, Jakarta Pusat.

Gambar II.12

Penataan Administrasi Kepegawaian dalam penerapan Aplikasi E-Kinerja



(Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

B. Kegiatan Operasional

1. Sumpah ASN

Bertempat di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, dilakukan pengambilan sumpah Aparatur Sipil Negara Lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut dengari dipimpin langsung oleh Bapak Ir. Subagiyo M.T. selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada Rabu (7/6).

Dalam kesempatan ini dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan berita acara pengambilan sumpah secara simbolis kepada perwakilan PNS serta penyampaian sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bahwa besar harapan kepada para PNS yang baru diambil sumpah di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat meneruskan prestasi pendahulunya, dapat melakukan perubahan yang memberikan nilai tambah, dan bekerja dengan sepenuh hati.

Kepada pejabat dan PNS, kita perlu meningkatkan kemampuan, memajukan organisasi, dan memberikan pelayanan publik yang prima untuk keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia. Selamat kepada para PNS yang baru, bekerja keraslah untuk mencapai prestasi yang lebih baik bagi diri sendiri dan organisasi.

Gambar II.13

Sumpah ASN



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

2. Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok bersama UPT Ditjen Hubla DKI Jakarta dan Mitra Kerja menyelenggarakan serangkaian kegiatan seperti Fun

Bike, Senam bersama, dan Cek kesehatan pada hari Jumat (15/9) di Learning Farm Ocean Ecopark Ancol.

Gambar II.14
Hari Perhubungan Nasional



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

Gambar II.15



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

3. Apel dan Penandatanganan Kontrak Kerja PPNNP

Apel Penandatanganan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNNP) Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Senin (16/1).

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Bapak Andi Hartono. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang telah membantu kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Bapak Andi juga menyampaikan kebijakan-kebijakan menyangkut Perjanjian Kerja PPNNP pada tahun ini. Beliau juga berharap agar seluruh PPNNP dapat terus meningkatkan kinerja dan kemampuan dalam membantu pelayanan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Gambar II.16



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

4. Peresmian Gedung dan Launching Aplikasi SI TAMPAN

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Jumat (27/01) melaksanakan peresmian pembangunan Gedung serbaguna Trisula dan Gedung Sinergi Haluan serta launching aplikasi SiTampam.

Diresmikan oleh Bapak Lollan Panjaitan selaku Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, disaksikan Kepala UPT Ditjen Hubla dan Pimpinan stakeholder serta Ketua Asosiasi Perusahaan Pelayaran di wilayah DKI Jakarta.

Dalam Sambutan nya Bapak Lollan Panjaitan menyampaikan dengan adanya peresmian gedung serbaguna Trisula dan gedung layanan Sinergi Haluan, serta

launching aplikasi SiTampam (Sistem Terpadu Manajemen Pelayanan) dapat menjadi salah satu bentuk komitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, guna mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut agar terus berjalan dengan baik, aman, lancar dan selamat dengan biaya yang terjangkau

Gambar II.17



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

5. Vaksinasi Booster Covid-19 dosis Kedua

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok bekerjasama dengan Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut (KOLINLAMIL) mengadakan kegiatan Vaksinasi Booster Covid-19 dosis Kedua Bagi Pegawai UPT DKI Jakarta dan Karyawan PT Pelindo Regional 2 Tg. Priok, dengan tujuan meningkatkan imunitas terhadap epidemiologi kasus covid – 19 dan adanya varian baru. Bertempat di Terminal Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 20-21 Februari 2023.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut Bapak Laksamana Muda Yayan Sofian, ST., M.Si, CHRMP dalam sambutannya Panglima Kolinlamil menyampaikan

kegiatan vaksinasi ini begitu penting, karna 70% kegiatan logistik Indonesia yang melalui transportasi laut berada di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan ini merupakan sektor yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi Indonesia.

Dalam sambutannya Bapak Andi Hartono selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Panglima Kolinlamil, kepada tenaga medis Dinas Kesehatan Kolinlamil, tenaga medis BKKP Ditjen Hubla, Tenaga medis KKP kelas I Tanjung Priok dan diucapkan terima kasih juga kepada GM PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok yang telah memfasilitasi ruangan dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Gambar II.18



Sumber Gambar Tim HUMAS Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

BAB III

BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL



1. PROGRAM

A. Kegiatan Pemerintahan

1. Kegiatan FGD dalam rangka Penyamaan Persepsi Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal serta Pengenalan Aplikasi Simkapel, Sitampas dan E Pas Kecil
2. Pelaksanaan Gerai Nasional Pas Kecil 2023 di Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

B. Kegiatan Operasional

1. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotek kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan;
2. Pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal;
3. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal;
4. Pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar;
5. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
6. Penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal
7. Pelaksanaan Uji Petik pada Kapal Wisata di Dermaga Marina Ancol.

C. Kegiatan Penunjang

1. Kegiatan Pengendalian Transportasi Laut Pada Masa Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023.
2. Kegiatan Pengendalian Transportasi Laut Dalam Rangka Natal Tahun 2023 Dan Tahun Baru 2024

II. REALISASI

A. Kegiatan Pemerintah

1. Kegiatan FGD dalam rangka Penyamaan Persepsi Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal serta Pengenalan Aplikasi Simkapel, Sitampin dan E Pas Kecil
Kegiatan FGD dalam rangka Penyamaan Persepsi Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal serta Pengenalan Aplikasi Simkapel, Sitampin dan E Pas Kecil, Dilaksanakan Pada hari Senin s.d Selasa (20-21) Februari 2023 di SWISS-BELHOTEL CIREBON.

Kegiatan FGD pada kesempatan ini dalam meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Pengukuran, Pengesahan Daftar Ukur, dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Secara Online di UPT DKI Jakarta dan sekitarnya.

Gambar III.1



(sumber gambar tim humas SMRT Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

Gambar III.2



(sumber gambar tim humas SMRT Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

2. Pelaksanaan Gerai Nasional Pas Kecil 2023 di Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Pelaksanaan Gerai Nasional Pas Kecil 2023 di Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 11 s/d 15 September 2023 dengan jumlah e pas kecil yang sudah di cetak 62 pcs. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.006/5/17/DK/2022 tanggal 23 Agustus 2022, tentang Gerai Nasional Pas Kecil dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta menyederhanakan proses pelayanan khususnya di bidang Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berbendera Indonesia bagi kapal kurang dari GT. 7.

Gambar III. 1



Pelaksanaan Gerai Nasional Pas Kecil 2022 Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.



(sumber gambar: tim humas SMRT Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

B. Kegiatan Operasional

1. Terlaksananya Pelaksanaan pemeriksaan kapal oleh petugas *marine inspector* pada bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal untuk penerbitan sertifikat.

Gambar III. 2

Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal



(sumber gambar tim humas SMRT Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

2. Terlaksananya Pelaksanaan Pengukuran Kapal oleh petugas ahli ukur kapal pada Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dalam rangka penerbitan Surat Ukur Kapal.

Gambar III. 3

Pengukuran Kapal dalam rangka penerbitan surat ukur kapal



3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal



No	Uraian	Januari s/d Oktober 2023
1	PENGUKURAN	
	a. Secara Internasional	11 kapal
	b. Secara nasional (dalam negeri)	6 kapal
2	SURAT UKUR KAPAL	
	a. Surat ukur tetap	
	- Dalam negeri	6 sertifikat
	- Internasional	21 sertifikat
	b. Surat ukur sementara	
	- Dalam negeri	9 sertifikat
	- Internasional	13 sertifikat
3	PENGANTIAN BENDERA	13 surat
4	GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL	48 Akta
5	GROSSE AKTA BALIK NAMA KAPAL	104 Akta
6	GROSSE AKTA PENDAFTARAN HIPOTEK	186 Akta
7	PENGHAPUSAN (deletion certificate)	9 surat
8	PAS BESAR	39 sertifikat
9	PAS BESAR SEMENTARA	9 sertifikat
10	PAS KECIL	171 sertifikat
11	ENDORSMENT PAS KECIL	7 sertifikat
12	SURAT LAUT SEMENTARA	168 sertifikat
13	ENDORSMENT SURAT LAUT	421 sertifikat
14	ENDORSMENT PAS BESAR	126 sertifikat
15	PENGESAHAN NAHKODA	-
16	HALAMAN TAMBAHAN	127 surat
17	STATUS HUKUM KAPAL	236 surat
18	ROYA	195 surat
	SEKSI SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL	
19	SERT. KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG	646 sertifikat
20	SERT. KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG	600 sertifikat
21	SERT. KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG	569 sertifikat
22	SERT. KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG	18 sertifikat
23	SERT. LAMBUNG TIMBUL DALAM NEGERI	55 sertifikat
24	SERT. KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI	0 sertifikat
25	SERT. BARANG BERBAHAYA (DG)	235 sertifikat
26	SERT. KESELAMATAN KAPAL DENGAN FUNGSI KHUSUS (SPS)	38 sertifikat



27	SERT. KESELAMATAN PENGEBORAN LEPAS PANTAI (MODU)	0 sertifikat
28	SERT. FITNESS (GASKIMIA)	28 sertifikat
29	SERT. PEMBEBASAN	0 sertifikat
30	SERT. KESELAMATAN NON KOMERSIL GT. 7 SD GT 35	38 sertifikat
31	SERT. SELAIN TERSEBUT DI ATAS	7 sertifikat
32	PERSETUJUAN PERCOBAAN BERLAYAR (SEA TRIAL)	117 sertifikat
SEKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL		
33	PEMERIKSAAN MARPOL	832 sertifikat
34	SERT. IOPP	0 sertifikat
35	SERT. SNPP	160 sertifikat
36	SERT. NLS	0 sertifikat
37	SERT. IAPP	0 sertifikat
38	SERT. ISPP	0 sertifikat
39	SERT. SMC	57 sertifikat
40	SERT. DOC	18 sertifikat
41	SERT. CLC	0 sertifikat
42	SERT. AFS	215 sertifikat
43	SERT. BWMC (AIR BALLAST)	30 sertifikat
44	PERSETUJUAN CLEANING	0 sertifikat
45	ENDORS MARPOL	352 sertifikat

C. Kegiatan Penunjang Operasional

1. Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Transportasi Laut Dalam Rangka Natal Tahun 2023 Dan Tahun Baru 2024 berdasarkan Surat Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2023 Tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.

Gambar III. 4

Pelaksanaan Pengendalian Transportasi Laut Pada Masa Idul Fitri 1443 Hijriah Tahun 2023.



(sumber gambar: tim humas SMRT Kantor Kesayabandatan Utama Tanjung Priok)

2. Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Transportasi Laut Dalam Rangka Natal Tahun 2023 Dan Tahun Baru 2024 berdasarkan Surat Instruksi Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2023 Tentang Uji Kelayaklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.

Gambar III. 6

Pelaksanaan Pengendalian Transportasi Laut Dalam Rangka Natal Tahun 2023 Dan Tahun Baru 2023 Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.



(sumber gambar tim SMRT Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok)

BAB IV

BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR



L. PROGRAM

A. Kegiatan Pemerintahan

1. Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema Optimalisasi Layanan Inaportnet PM 8 Tahun 2022;
2. Evaluasi berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok
3. Pembahasan Hasil Pilot Assesment, Penandatanganan Dan Penyerahan Surat Keterangan Penugasan Pandu (Skpp)
4. Pembahasan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Evaluasi Berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok Semester I Tahun 2023

B. Kegiatan Operasional

1. Penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
2. Penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal;
4. Pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
5. Pelaksanaan penerbitan surat persetujuan berlayar;
6. Kegiatan *SSI_COE PSC Introduction Training* di Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Terlaksananya pemeriksaan kapal asing oleh petugas *Port State Control Officer (PSCO)* Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
8. Terlaksananya pemeriksaan kapal oleh petugas *Flag State Control Officer (FSCO)* dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
9. Terlaksananya Pelayanan terhadap dokumen Kepelautan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan adanya ruang Pelayanan Prima Satu Atap (PPSA) dengan Baik;
10. *Grand Launching Rute Baru Meratus International Indonesia – China*;
11. Kegiatan Evaluasi Pemanduan dan Penundaan Kapal Pelabuhan Tanjung Priok;
12. Assesment dan Penerbitan Surat Keterangan Penugasan Pandu.

C. Kegiatan Penunjang Operasional

Last Call 2022 yaitu kapal KM. KELUD dan *First Call 2023* yaitu kapal MV. Rio Grande.

II. REALISASI

A. Kegiatan Pemerintah

1. Kegiatan Focus Group Discuccion (FGD) dengan tema Optimalisasi Layanan Inaportnet PM 8 Tahun 2022;

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melalui Bidang Keselamatan Berlayar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Optimalisasi Layanan Inaportnet PM 8 Tahun 2022 tentang tata cara pelayanan kapal melalui Inaportnet dan perlindungan Awak kapal di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, serta pengenalan aplikasi SiTampin (Sistem Terpadu Manajemen Pelayanan) yang akan diterapkan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, (17/02) bertempat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.

Focus Group Discussion ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Bapak Andi Hartono dengan menghadirkan Narasumber Perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ibu Ayu Khariza dengan materi Penerapan PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal melalui Inaportnet serta perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Bapak Rajuman Sibarani dengan materi Pemenuhan Persyaratan Pengawakan diatas Kapal, Pembahasan Perlindungan Awak Kapal dan Proses Perekrutan serta Penempatan Awak Kapal.

Dengan diselenggarakannya kegiatan FGD ini diharap dapat meningkatkan layanan bagi pengguna jasa menjadi lebih optimal.

Gambar IV.1

Kegiatan Focus Group Discuccion (FGD) dengan tema Optimalisasi Layanan Inaportnet PM 8 Tahun 2022



2. Evaluasi berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Melalui Bidang Keselamatan Berlayar bersama Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, dan PT Jasa Armada Indonesia melaksanakan kegiatan Evaluasi Berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal Di Pelabuhan Tanjung Priok Semester II Tahun 2022 dengan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Bapak Capt. Weku Frederik Karuntu, MM. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 16 s.d. 17 Maret 2023 bertempat di Hotel Santika Kota Harapan Indah Bekasi.

Adapun rangkaian kegiatan evaluasi yang sudah dilaksanakan meliputi aspek keselamatan dan keamanan, pelayanan serta kinerja pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, antara lain:

1. Kelaikan dan kelengkapan sertifikasi dan perizinan sarana bantu dan prasarana pemanduan.
2. Pemenuhan persyaratan sumber daya manusia pemanduan.
3. Pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal secara wajar dan tepat sesuai sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan.

4. Pemenuhan standar kinerja pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
5. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketertiban dan kesesuaian laporan bulanan kegiatan operasional pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
7. Penerapan dan pengawasan protokol kesehatan di setiap kegiatan pelayanan pemanduan.

Gambar IV.2

Evaluasi berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok



3. Pembahasan Hasil Pilot Assesment, Penandatanganan Dan Penyerahan Surat Keterangan Penugasan Pandu (Skpp)

Bertempat di Hotel Papandayan Bandung, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melaksanakan Kegiatan Pembahasan Hasil Pilot Assessment, Penandatanganan dan Penyerahan Surat Keterangan Penugasan Pandu (SKPP) pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2023 dengan dipimpin dan dibuka oleh capt. Weku Fredik Karuntu selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Capt. Weku menyampaikan tentang kelancaran, keamanan, keselamatan dari kapal yang dipandu sebagai hal utama dalam pelaksanaan pemanduan kapal. Karena kelalaian atas kegiatan pemanduan dan penundaan kapal dapat berpengaruh pada kelancaran lalu lintas kapal serta terhadap perairan dan lingkungannya.

Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan tujuan mewujudkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal yang prima serta memuaskan para pengguna jasa pemanduan.

Gambar



4. Pembahasan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Evaluasi Berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok Semester I Tahun 2023

Kegiatan Evaluasi Berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok melalui perhatian pada pendukung faktor sumber daya manusia dan memastikan pemenuhan standar kinerja dalam kegiatan pelayanan tersebut. Kegiatan ini bertempat di Nagoya Hill Hotel Batam dilaksanakan selama 3 (tiga)

hari pada tanggal 20 s.d. 22 Juli 2023 dan dibuka langsung oleh Capt. Weku Fredik Karuntu selaku Kepala Kantor Kesyahbандaran Utama Tanjung Priok.

Capt. Weku menyampaikan tentang kelancaran, keamanan, keselamatan dari kapal yang dipandu sebagai hal utama dalam pelaksanaan pemanduan kapal. Karena kelalaian atas kegiatan pemanduan dan penundaan kapal dapat berpengaruh pada kelancaran lalu lintas kapal serta terhadap perairan dan lingkungannya.

Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan tujuan mewujudkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal yang prima serta memuaskan para pengguna jasa pemanduan.

Gambar IV.3

Pembahasan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Evaluasi Berkala Pemanduan dan Penundaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok Semester I Tahun 2023





B. Kegiatan Operasional

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Tertib Berlayar

Tabel IV. 1:
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Tertib Berlayar

NO	URAIAN	Januari s.d September 2023
1.	PENGELUARAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR	14.428 kapal
2.	KAPAL MASUK	
	a. kapal bendera RI	11.182 kapal
	b. kapal bendera asing	2.515 kapal
3.	KAPAL KELUAR	
	a. kapal bendera RI	11.886 kapal
	b. Kapal bendera asing	5.214 kapal
4.	PEMERIKSAAN PORT STATE CONTROL (PSC)	
	a. inspection	282 kapal
	b. detention	22 kapal
	c. pemeriksaan kapal bendera RI yang berlayar ke luar negeri	17 kapal
5.	KAPAL MUAT <i>ONDECK</i> / MUAT GELADAK	
	a. <i>ondeck</i> / muat geladak	347 kapal

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Kepelautan



NO	URAIAN	2023 Januari s.d Oktober
1.	PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) a. pengesahan PKL kapal Indonesia b. pengesahan kapal asing	16.668 dokumen 22.655 dokumen
2.	PENYIJILAN AWAK KAPAL (ABK) a. Sijil On Perusahaan - Kapal RI - Kapal Asing b. Sijil Off Perusahaan - Kapal RI - Kapal Asing c. Sijil On Perorangan - Kapal RI - Kapal Asing d. Sijil Off Perorangan - Kapal RI - Kapal Asing	14.786 buku 22.375 buku 2.945 buku 9.720 buku 0 buku 0 buku 5.484 buku 5.556 buku
3.	Pengesahan <i>Crew List</i>	2.523 dokumen
4.	Pengesahan <i>Crew List</i> Perwira Jaga	7.651 dokumen
5.	BUKU PELAUT a. perpanjangan buku pelaut b. penerbitan buku pelaut c. penggantian buku pelaut	12.185 dokumen 9.668 buku 2.772 buku
6.	Pembuatan Masa Layar	12.476 dokumen
7.	<i>Safe Manning</i>	260 dokumen
8.	Pencantuman Ijazah	16 dokumen
9.	Legalisir Buku Pelaut Pengaduan Pelaut	0 buku -



3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Tertib Bandar

Tabel IV. 3
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Tertib Bandar

NO	URAIAN	Januari s.d September 2023
1.	Surat Persetujuan olah Gerak (SPOG)	15.209 surat
2.	SPOG Berkala	357 surat
3.	SPOG Alur Nusantara	1.511 surat
4.	Surat Persetujuan Sandar Haluan Darat	212 surat
5.	Kegiatan Immobilisasi	89 surat
6.	Surat Persetujuan Sandar Beaching	378 surat
7.	Kegiatan Kapal Drill Life Boat	53 surat
8.	Kegiatan Kapal Penebalan Marka Garis Muat	6 surat
9.	Surat Persetujuan Sandar Overstake	40 surat

(Sumber Seksi Tertib Bandar bulan Oktober 2023)

C. Kegiatan Penunjang

1. Sebagai bentuk semangat baru di tahun 2022 diadakan seremoni penyambutan container pertama di Pelabuhan JICT dengan *last call* 2022 yaitu kapal KM. Kelud dan *first call* 2023 yaitu kapal MV. Rio Grande

Gambar IV. 8

Kegiatan *Last Call* 2022 dan *First Call* Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023





BIDANG PENJAGAAN, PATROLI DAN PENYIDIKAN

I. PROGRAM

A. Kegiatan Pemerintahan

1. Kegiatan Sosialisasi ISSC Sementara di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
2. Pelaksanaan Sinergi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Unit Pelaksana Teknis (UPT) DKI Jakarta di Lingkungan Direktorat Perhubungan Laut.

B. Kegiatan Operasional

1. Giat Patroli Keselamatan Maritim
2. Pengawasan inspeksi rutin ISPS Code Terminal Penumpang PT. Pelindo (Persero) Regional II Cabang Tanjung Priok;
3. Proses pengangkatan truk tanki tercebur di PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Kegiatan pengawasan embarkasi dan debarkasi penumpang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok terlaksana dengan tertib dan lancar;
5. Pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dan pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun(B3);
6. Kolaborasi apel besar HSSE di PT. Indonesia Kendaraan Terminal;
7. Kolaborasi latihan teknik penyidikan tindak pidana tertentu di laut yang diselenggarakan antara Lantamal III;
8. Pengecekan penerbitan ISSC Sementara MV. Meratus Semarang;
9. Pemeriksaan dan Penyidikan kebakaran kapal di TUKS PT. Union Yard;
10. Penjagaan Dinas Provoost Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok dan pengawasan siswa diklat PSC.
11. Latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di laut atau yang dikenal dengan Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang melibatkan seluruh unsur baik dari pemerintah, BUMN, swasta maupun stakeholder lainnya;
12. Evakuasi pengangkatan mobil tangki jatuh ke laut di Kade 003;
13. *Wet Drill dan Exercise* penanggulangan tumpahan minyak Pada PT. Pelindo (persero) regional 2 Tanjung Priok;

II. REALISASI

A. Kegiatan Pemerintah

1. Sesuai amanat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP/DJPL.413 Tahun 2022 tentang Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Kapal dan Fasilitas Pelabuhan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan terkait penerbitan ISSC Sementara di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bertempat di The Sahira Hotel, Bogor pada tanggal 10 Maret 2023;
- 2.

Gambar 1.1
Penerbitan ISSC Sementara di Unit Pelaksana Teknis (UPT)



3. Untuk menyamakan pemahaman penyidikan tindak pidana pelayaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok membuat sinergitas Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) Unit Pelaksana Teknis (UPT) DKI Jakarta di Lingkungan Direktorat Perhubungan Laut demi tercipta pelayaran yang aman dan tertib. Bertempat di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 18 Juli 2023, para PPNS di lingkungan UPT DKI Jakarta kembali diberikan pembekalan dan informasi terkait tentang penyidikan tindak pidana pelayaran yang berkembang sesuai dengan saat ini.

Gambar 1.2

Sinergi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UPT DKI Jakarta



Kegiatan Operasional

1. Giat Patroli Keselamatan Maritim

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Bapak Andi Hartono bersama General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Bapak M. Hadi Syafitri Noor dan Pejabat Struktural Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok meninjau langsung area di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, pada Rabu (11/1). Kegiatan Patroli ini dimulai dari Dermaga Arsa, Dermaga Kalijabat, New Priok Container Terminal One (NPCT I) hingga Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok. Kegiatan berlangsung menggunakan kapal Kelas IV KN 488, RIB R 01 Dan Kapal kelas V KN 557 Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan tujuan untuk memastikan lalu lintas pelayaran dalam kondisi aman dan lancar dalam proses sandar maupun keberangkatan kapal dari dermaga-dermaga disekitar kolam bandar khususnya Dermaga NPCT I.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Penjagaan

Tabel 3.1
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Penjagaan
Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

NO	KEGIATAN	Jumlah
1.	Pengawasan embarkasi dan debarkasi	18.973 jiwa
2.	Pengawasan bongkar barang khusus	1.286 kapal
3.	Pengawasan muat barang khusus	229 kapal
4.	Pengawasan bongkar barang berbahaya	3.000 kapal
5.	Pengawasan muat barang berbahaya curah	4.572 kapal
6.	Kejadian ujuk rasa	2 kali
7.	Kecelakaan lalu lintas	2 kejadian



8.	Orang meninggal	1	kejadian
9.	Surat Persetujuan/Rekomendasi tempat penumpukan Barang Berbahaya	12	Surat
10.	Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerja Pengerukan	5	Surat

sumber seksi penjagaan

Tabel 3.2

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyelidik
Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

NO	KEGIATAN	2023
1.	Alih muat perairan pelabuhan	153 kegiatan
2.	Pekerjaan bawah air / <i>salvage</i>	5 kegiatan
3.	<i>Audit SoCPF</i> (Fasilitas Pelabuhan)	4 kegiatan
4.	Laporan pengelasan Darat	296 kegiatan
5.	Laporan kecelakaan kapal	10 kejadian
6.	Laporan pengelasan Kapal di Dermaga	406 kegiatan
7.	Laporan Verifikasi Kapal (ISSC)	12 kegiatan
8.	Penerbitan ISSC Sementara	40 kegiatan

sumber seksi Penunjang Keselamatan dan Penyelidikan

3. Dalam Rangka pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dan pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Bertempat di PT. Jakarta International Container Terminal dilakukan pemeriksaan oleh anggota Penjagaan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Gambar 3.1

Pemeriksaan lapangan penumpukan bongkar barang berbahaya



4. Keamanan dan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang dimana penumpang yang naik maupun turun terlaksana dengan tertib dan lancar.

Gambar 3.2
Pengawasan Embarkasi dan Debarkasi Penumpang di Terminal Penumpang
Nusantara Pura II Pelabuhan Tanjung Priok



5. Kolaborasi apel bersama Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan HSEE Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan pelayaran termasuk kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh.

Gambar 3.3

Apel Bersama HSEE Pelabuhan Tanjung Priok



6. Demi terciptanya Fasilitas Pelabuhan yang aman Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung melalui Auditor ISPS Code melakukan Inspeksi Rutin ke Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Pelabuhan melaksanakan mandatory IMO ISPS Code.

Gambar 3.4

Tim SAR Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melakukan pengangkatan mobil Pickup dan korban



7. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sebagai Koordinator *Port Security Committee (PSC)* Pelabuhan Tanjung Priok wajib untuk mengawasi dan kesiapan serta melatih keterampilan personil di Fasilitas Pelabuhan dari ancaman dari segala bentuk ancaman maka dilaksanakan *Drill dan Exercise*.

Gambar 3.5

Kegiatan *Drill dan Exercise ISPS CODE* pada PT. Pertamina



8. Dalam rangka memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis, dokumen, dan keselamatan pelayaran dan juga menindak

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, seperti pelanggaran terhadap aturan keselamatan, keamanan, dan lingkungan laut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan pemeriksaan bagi kapal-kapal yang berada di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Gambar 3.6

Permintaan Keterangan Kebakaran Kapal di TUKS PT. Union Yard



Indonesia sebagai anggota IMO berkomitmen dalam melindungi lingkungan maritim. National Marpollex 2023, yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berlangsung di Jakarta pada 16-21 Oktober 2023. Tujuannya adalah menguji dan meningkatkan penanggulangan tumpahan minyak di Pelabuhan Tanjung Priok, yang memiliki peran strategis dalam pelayaran, mengingat insiden tumpahan minyak laut yang sering terjadi di Indonesia. Harapannya adalah agar latihan ini menunjukkan kesiapsiagaan stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok dan Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi tumpahan minyak.

Gambar V.7

Marine Pollution Exercise (Marpollex)



Pada tahun 2022, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah selesai melaksanakan tugas penyusunan Laporan Tahunan yang merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan realisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dari unit kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sepanjang tahun 2022 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Berbagai upaya dilakukan secara maksimal guna mencapai target dengan tidak meninggalkan norma-norma batasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama yang merupakan pedoman melaksanakan tugas dan fungsi bagi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok agar terhindar dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) guna mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi *covid-19* pada Tahun 2022, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah menetapkan Protokol Kesehatan yang ketat pada pelayanan dokumen pelaut dan pelayanan dokumen kapal dengan menerapkan penerapan teknologi informasi dan membatasi kuota harian layanan untuk menghindari terjadinya antrian dan terciptanya cluster baru *covid-19*.

Keberhasilan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tidak terlepas dari Kerjasama semua unit kerja yang ada. Mengingat adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada tahun 2021, selain terkendala anggaran juga karena kondisi pandemic *covid-19* maka perlu dievaluasi dan dikoordinasikan antara jajaran unit kerja di dalam maupun di luar Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Adanya upaya Pemerintah dalam peningkatan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi permasalahan maupun tantangan yang dihadapi dalam keselamatan pelayaran, perlu dukungan anggaran untuk tercukupinya pelaksanaan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Peran serta swasta dalam ikut mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas

sumber daya manusia baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung.

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti program latihan melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelatihan penanggulangan tumpahan minyak, *Search and Rescue* (SAR), dan pemadam kebakaran. Yang dilakukan oleh Direktorat Terkait di Direktorat Jenderal perhubungan Laut, dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa untuk pelayanan secara online misalnya seperti pelayanan Buku Pelaut online, *SPB Online* dan Mendorong upaya-upaya pemenuhan anggaran untuk menunjang kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi pada setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Tahunan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tahun 2022 sebagai media pertanggung jawaban, juga dapat digunakan untuk melakukan *control* terhadap pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. Namun demikian, Laporan Tahunan yang disusun setiap berakhirnya tahun anggaran harus lebih disempurnakan lagi pada tahun-tahun mendatang baik yang menyangkut substansi atau isi laporan maupun mekanisme penyusunannya sehingga Laporan Tahunan tersebut dapat merepresentasikan secara lebih lengkap tentang berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Tahun 2022 ini masih belum sempurna sehingga sangat diharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk lebih sempurnanya Laporan Tahunan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud diatas telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1512/M.KT.01/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;

bahwa organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;

Penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing memerlukan beberapa faktor penting seperti Infrastruktur, Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Regulasi yang baik. Transportasi laut di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari sistem transportasi yang melayani sebagian besar wilayah pulau – pulau yang tersebar luas di Indonesia dan juga penghubung antar Negara. Transportasi

laut memegang peran penting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Laporan Tahunan ini berfungsi sebagai sarana dan penyampaian informasi tentang kegiatan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan merupakan pertanggungjawaban Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.

Laporan Tahunan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini disusun untuk menggambarkan informasi secara singkat namun komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah melebur antara Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada bulan Oktober Tahun 2023

Gambar 1.1

Peta lokasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok



Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terletak pada 6°6'29" LS 106°52'49" BT yang berada di area pelabuhan tersibuk di Indonesia,

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintahan di bidang kebandaran, perkapalan dan jasa maritim dalam lingkungan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok bertugas untuk mengatur pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai standar nasional dan internasional.

Keberadaan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok memiliki peran vital dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Dimana Pelabuhan Tanjung Priok memiliki posisi yang begitu penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional yaitu sebagai pintu gerbang konektivitas ekonomi nasional dan internasional. Daerah lingkungan kerja yang termasuk dalam lingkup Kesyahbandaran Tanjung Priok meliputi perairan pelabuhan dengan batas-batas, yakni :

06° - 07' - 15" LS – 106° - 49' - 18" BT;

06° - 04' - 00" LS – 106° - 51' - 18" BT;

06° - 04' - 00" LS – 106° - 55' - 18" BT;

06° - 06' - 05" LS – 106° - 55' - 18" BT.

Gambar I. 2

Peta Alur Pelayaran dan Zona Labuh di Pelabuhan Tanjung Priok



Setiap Instansi baik itu Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta memiliki tujuan Organisasi yang ingin dicapai oleh para pelaksana instansi tersebut. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan dimaksud, diperlukan evaluasi dan program kerja yang berguna sebagai acuan didalam pencapaian tujuan dimaksud.

Untuk memperoleh gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok maka perlu disusun suatu laporan yang dapat memberikan uraian secara rinci tentang kegiatan yang menjadi Program Kerja, Realisasi dari Program Kerja dimaksud maupun kegiatan yang diprogramkan namun belum dapat dilaksanakan serta menyusun Program Kerja (PROKER) tahun berikutnya.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan data kegiatan dan data laporan selama Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Maksud dari penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diembannya serta

menginformasikan keberhasilan yang telah dicapai dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.

Hal-hal yang belum dapat dicapai dan dilaksanakan perlu dianalisa apa yang menjadi kendala untuk dicarikan upaya untuk mengatasi masalah dan kendalanya, sedangkan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan perlu di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Tujuan disusunnya laporan tahunan ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan beban tugas yang diembannya, sekaligus dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana serta program kerja dan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pada tahun berikutnya.

II. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, serta sertifikasi kelaiklautan kapal.
2. Fungsi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
 - a. pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, pemeriksaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, dan penahanan kapal atas perintah pengadilan;
 - b. pelaksanaan pengaturan, penyediaan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengaturan lalu lintas

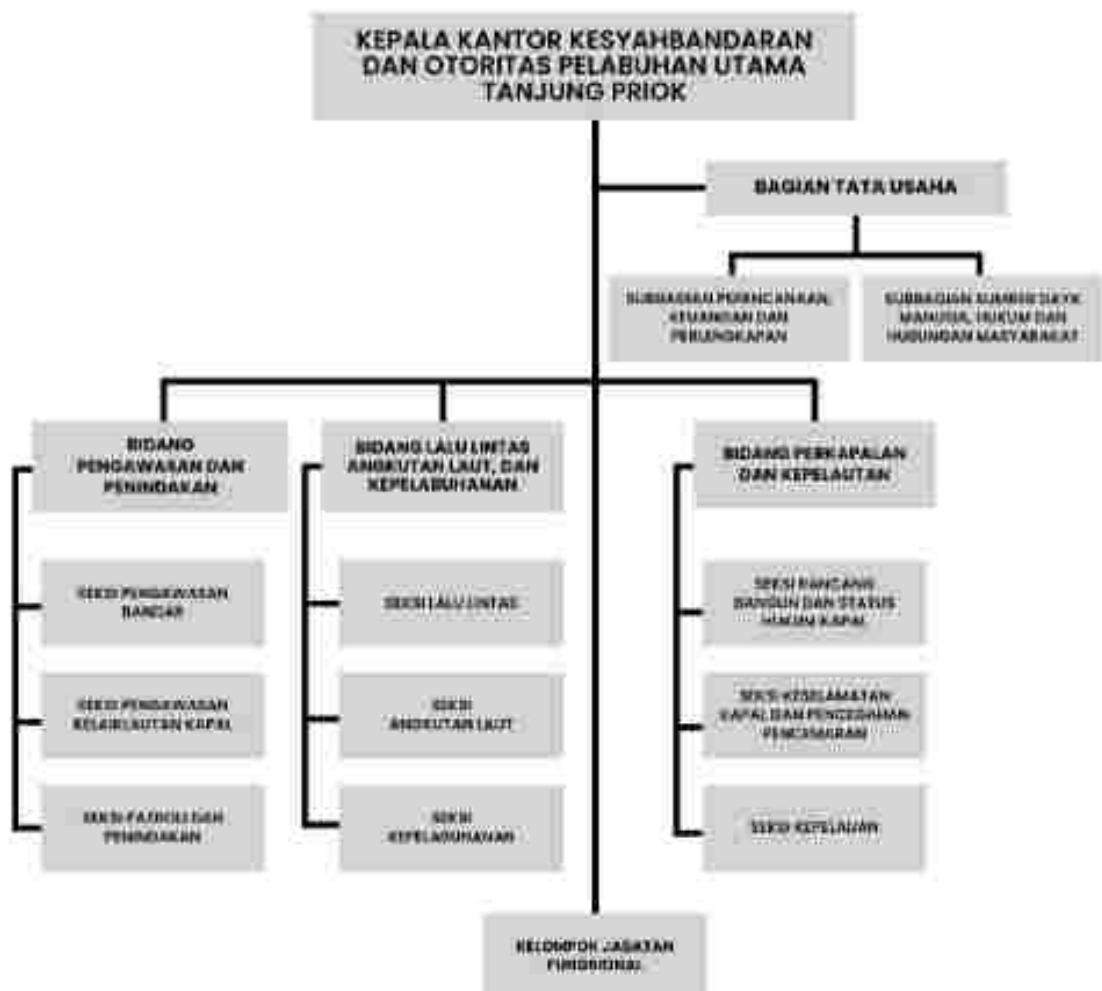


- kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pamariduan kapal dan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal serta penyijilan awak kapal;
 - f. penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

III. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama digambarkan sebagai berikut

Gambar III.1
Struktur Organisasi



Susunan organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, terdiri atas:

- 1) Bagian Tata Usaha;
- 2) Bidang Pengawasan dan Penindakan;
- 3) Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan;
- 4) Bidang Perkapalan dan Kepelautan;

1. BAGIAN TATA USAHA

A. Tugas Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

B. Fungsi Bagian Tata Usaha:

- 1) penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 2) penyiapan bahan ketatausahaan, kerumahtanggaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- b) Subbagian Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat



Subbagian Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan persiapan bahan ketatausahaan, kerumahtanggaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

2. BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

A. TUGAS BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, pemeriksaan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan penahanan kapal atas perintah pengadilan.

B. FUNGSI BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN:

1. pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta barang curah padat, barang khusus, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
2. pengawasan kelaiklautan kapal, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, pemeriksaan kapal berbendera Indonesia dan pemeriksaan kapal asing, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dan surat persetujuan berlayar; dan
3. pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan, penahanan kapal atas perintah pengadilan, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, tertib lalu lintas kapal di

perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Bidang Pengawasan dan Penindakan Terdiri Atas

- a. Seksi Pengawasan Bandar;
- b. Seksi Pengawasan Kelaiklautan Kapal; dan
- c. Seksi Patroli dan Penindakan.

1) Seksi Pengawasan Bandar

mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta barang curah padat, barang khusus, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi

2) Seksi Pengawasan Kelaiklautan Kapal

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dan surat persetujuan berlayar

3) Seksi Patroli dan Penindakan.

mempunyai tugas melakukan pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan, penahanan kapal atas perintah pengadilan, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/ SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan

3. BIDANG LALU LINTAS, ANGKUTAN LAUT, DAN KEPELABUHANAN

A. TUGAS

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah - lingkungan kepentingan pelabuhan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal dan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, serta pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran.

B. FUNGSI

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

1. pengawasan dan pengendalian trayek angkutan laut dalam negeri, pelayaran rakyat, angkutan laut luar negeri dan angkutan laut khusus;
2. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait serta evaluasi tarif usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait; dan
3. penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan kelancaran arus barang, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan rencana induk pelabuhan, penyusunan dan pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri Perhubungan atas penggunaan perairan dan/atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan dan evaluasi tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui

permanduan kapal, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan Laut; dan
- c. Seksi Kepelabuhanan.

1) Seksi Lalu Lintas;

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian trayek angkutan laut dalam negeri, pelayaran rakyat, angkutan laut luar negeri dan angkutan laut khusus.

2) Seksi Angkutan Laut; dan

Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait serta evaluasi tarif usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait.

3) Seksi Kepelabuhanan.

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengaturan, pengawasan dan penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan kelancaran arus barang, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan rencana induk pelabuhan, penyusunan dan pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri Perhubungan atas penggunaan perairan dan/atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan dan evaluasi tarif jasa kepelabuhanan



yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.



4. BIDANG PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

A. TUGAS

melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal serta penyijilan awak kapal.

B. FUNGSI

1. penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau pengujian, pengesahan, penerbitan sertifikasi di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal, pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran kapal serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal;
2. penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau audit penerbitan sertifikasi di bidang keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal; dan
3. penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelaotan dan penyijilan awak kapal.

Bidang Perkapalan dan Kepelaotan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal;
- b. Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran; dan
- c. Seksi Kepelaotan.

1) Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau pengujian, pengesahan, penerbitan sertifikasi di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal, pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran kapal serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.

2) Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau audit penerbitan sertifikasi di bidang keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal.

3) Seksi Kepelautan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan dan penyijilan awak kapal. Di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

IV. KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 333 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 56 orang Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNP) sebagai berikut:

C. APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1. Berdasarkan Golongan

Jumlah Personil yang ada di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat dalam Tabel I.1.

Tabel I.1

Personil Menurut Golongan

NO	Golongan	A	B	C	D	JUMLAH
1	Golongan IV	20	3	-	1	24
2	Golongan III	36	93	78	67	274
3	Golongan II	2	7	3	20	32
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	CPNS					3
6	PPPK					5
Total						338

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan desember 2023)

2. Berdasarkan Pendidikan Umum

Sebaran pendidikan personil pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat pada Tabel IV. 2.

Tabel I. 2
Personil Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT IJAZAH	JUMLAH
1	Doktor (S3)	1
2	Magister (S2)	46
3	Sarjana (S1)	108
4	Diploma 4 (D4)	18
5	Diploma 3 (D3)	32
6	SLTA	122
7	SLTP	11
8	SD	0
	Total	338

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan Desember 2023)

3. Menurut Jenis Kelamin

Pembagian jenis kelamin personil pada Kantor Kesyahbandara Utama Tanjung Priok, seperti pada tabel I. 5 :

Table I. 5.
personil berdasarkan jenis kelamin :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	LAKI - LAKI	271	
2	PEREMPUAN	67	
	TOTAL	338	

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan desember 2023)

D. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

3. Berdasarkan Pendidikan Umum

Sebaran pendidikan Umum personil Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat pada Tabel I. 6.

Tabel I. 6.
Personil PPNPN Menurut Ijazah

NO	TINGKAT IJAZAH	JUMLAH
1	Sarjana (S1)	14
2	D4	3
3	D3	1
4	SLTA	27
5	SLTP	7
6	SD	4

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan desember 2023)

V. KEUANGAN KANTOR KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK

D. ANGGARAN :



Jumlah Anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 bulan November sampai dengan Desember 2023 seperti pada tabel 1.8

Tabel 1.8
Anggaran yang tersedia dan realisasinya

TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
2023 Januari s/d Oktober	57.764.560.000	57.363.658.771	400.901.229

E. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Jumlah Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun Anggaran 2023 seperti pada tabel 1.9



Tabel 1.9
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
s/d Oktober 2023

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI Sd Oktober 2023 (Rp)	Persentase
1	Penerimaan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	14.178.678.000	11.544.113.757	81 %
2	Penerimaan Jasa Kenavigasian	8.711.452.000	6.981.150.892	80 %

F. DATA BARANG MILIK NEGARA



Tabel I. 10
Data Kendaraan Dinas dan Kapal Negara Patroli
s/d Desember 2023

NO	Jenis Barang	Volume	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	23	Unit	
2	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Unit	
3	Kendaraan Dinas Roda 2	64	Unit	
4	Kapal Negara Patroli Kelas 3	1	Unit	
5	Kapal Negara Patroli Kelas 4	1	Unit	
6	Kapal Negara Patroli Kelas 5	2	Unit	
7	Kapal <i>Rigid Inflatable Boots</i> (RIB)	1	Unit	

BAB II
BAGIAN TATA USAHA

I. PROGRAM

A. Kegiatan Pemerintahan

1. Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial
2. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
3. Forum Kehumasan *Coffe Morning*
4. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tingkat Wilayah UAPPA/B-W SEMESTER II TA 2023
5. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulan November 2023
6. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
7. Jumpa Pers Penyelenggaraan Angkutan Laut NATARU 2023-2024

B. Kegiatan Operasional

1. Pertemuan Rutin Dharma Wanita KSOP Utama Tanjung Priok
2. Sertifikasi ISO 9001:2015
3. Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018

II. REALISASI

A. Kegiatan Pemerintahan

1. Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial

bertempat di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial dalam rangka dalam rangka Evaluasi dan Penyusunan Laporan PPID, pada Senin Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial Tahun 2023 diikuti oleh personel Kehumasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok serta Unit Pelaksana (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DKI Jakarta, dengan jumlah ± 50 orang. Kegiatan ini merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas kami sebagai badan publik yang dituntut untuk senantiasa memberikan informasi yang seluas-luasnya tanpa ruang dan sekat yang membatasi.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru sehingga meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2023

Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2023 di De Java Hotel, Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh para pegawai dan pejabat struktural Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Kegiatan ini dimulai dengan sambutan oleh Bapak Ir. Subagiyo, M.T., selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dalam sambutannya, Beliau mengungkapkan maksud dari kegiatan ini, yaitu sebagai persiapan untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) ditingkat Eselon I yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun laporan BMN di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang lebih akuntabel, komprehensif, efektif, dan efisien. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi di seluruh bidang dan bagian dalam lingkungan Kantor KSOP Utama Tanjung Priok. Kegiatan ini berlangsung pada 1 s.d. 3 November 2023 dan juga melibatkan narasumber melalui daring online, Bapak Muchtar Fathoni dari Kanwil DJKN DKI Jakarta. Dengan dilaksanakannya acara Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun Anggaran 2023, diharapkan bahwa laporan BMN yang disusun akan memenuhi standar akuntabilitas dan efisiensi.

3. Forum Kehumasan UPT DKI Jakarta Coffee Morning

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok mengadakan Forum Kehumasan UPT DKI Jakarta Coffee Morning, dilakukan untuk upaya memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi

Kantor KSOP Utama Tanjung Priok. Kegiatan ini merupakan langkah awal agar meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Forum Kehumasan ini diselenggarakan pada tanggal 15 November 2023, di Orchardz Hotel Industri. Selain itu tujuan diadakannya acara ini, untuk menyambut kepemimpinan baru, yaitu M. Takwin Masuku menjabat sebagai Kepala Kantor dan Ir. Subagiyo yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan. Harapan dari kegiatan ini bahwa sinergi yang dibangun bersama dapat meningkatkan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan dan tugas yang akan datang. Dengan Memupuk harmonisasi dan memperkuat hubungan antar instansi demi peningkatan aspek keamanan dan keselamatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

4. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tingkat Wilayah UAPPA/B-W SEMESTER II TA 2023,

Kantor KSOP Utama Tanjung Priok telah Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tingkat Wilayah UAPPA/B-W SEMESTER II TA 2023, dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 30 November hingga 2 Desember 2023 bertempat di Swiss-Bel Hotel Bogor. Kegiatan ini dibuka oleh M. Takwim Masuku selaku Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok melalui daring pada Jum'at. Dalam sambutannya, M. Takwim Masuku menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi data PNBP penting untuk dilakukan guna memastikan keakuratan data PNBP yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan. M. Takwim Masuku juga berharap bahwa kegiatan ini dapat dijadikan momentum bagi para operator aplikasi untuk menjadi operator yang profesional, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja PNBP di Wilayah Koordinasi DKI Jakarta. Selain itu, Kegiatan ini dihadiri

oleh narasumber dari KPPN Jakarta IV, yaitu Nazif Azhari dan Andika Praba melalui daring. Kegiatan ini diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah Koordinasi DKI Jakarta, yaitu Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Kepala KSOP Kelas II Marunda, Kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa, Kantor BTKP Tanjung Priok, Kantor BKIP Tanjung Priok, Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke dan Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu.

5. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulan November 2023

Kantor KSOP Utama Tanjung Priok Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulan November 2023 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 07 Desember hingga 09 Desember 2023 bertempat di Swiss-Belboutique Yogyakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Lusi Andayani, S.T., M.M.Tr. pada Kamis, Kepala Bagian Tata Usaha Lusi Andayani menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi PNBP ini merupakan acara rutin yang di gelar setiap bulannya oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang melakukan rekonsiliasi dengan PT Pelindo serta PT Pertamina. Nantinya hasil dari Rekonsiliasi hari ini akan dituangkan dalam Berita Acara yang akan ditandatangani oleh Para Pihak. Lusi Andayani Saya berharap rekonsiliasi ini dapat berjalan lancar dengan terpenuhinya data dukung yang lengkap serta transparansi data dari berbagai pihak dalam rekonsiliasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas rekonsiliasi. Oleh sebab itu diharapkan komitmen dan kerja keras berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung upaya optimalisasi PNBP dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi maupun di lapangan.

6. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) untuk Semester II Tahun 2023

KSOP utama Tanjung Priok melaksanakan kegiatan koordinasi persiapan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) untuk Semester II Tahun 2023 (13-16/12), Bogor. Kegiatan ini bertujuan utama melakukan penyesuaian dan pencocokan data transaksi keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) selama Semester II Tahun 2023. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan integritas dan ketepatan data keuangan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di tingkat wilayah, khususnya pada unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah. Dengan melakukan penyesuaian dan pencocokan data, diharapkan dapat tercipta laporan keuangan yang lebih akurat dan reliabel. Kegiatan ini memiliki fokus khusus pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terutama pada unit pelaksana teknis wilayah koordinasi DKJ Jakarta. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, komprehensifitas, efektivitas, dan efisiensi laporan keuangan. Dengan memastikan bahwa data transaksi keuangan telah disesuaikan dengan baik, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar tinggi dalam hal integritas dan keakuratan informasi keuangan. Melalui kerjasama dan koordinasi antarinstansi dalam kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai efisiensi operasional serta pemahaman yang lebih baik terkait kondisi keuangan di tingkat wilayah, memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

7. Jumpa Pers Penyelenggaraan Angkutan Laut NATARU 2023-2024

Dalam rangka kesiapan menghadapi musim Natal 2023 dan menyambut Tahun Baru 2024 (NATARU), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menggelar kegiatan Jumpa Pers Penyelenggaraan Angkutan Laut NATARU 2023-2024 di Pelabuhan Tanjung Priok bersama instansi pemerintah dan stakeholder pada hari Rabu, Narasumber Jumpa Pers yang berlangsung di Museum Maritim Indonesia, selain Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, S.T., M.MT, juga menghadirkan perwakilan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, dan PT Pelni DKI Jakarta. Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, dalam paparannya menyampaikan upaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan angkutan laut, pihak Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melakukan uji petik terhadap 14 kapal yang akan beroperasi pada musim Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, serta membuka Posko Terpadu di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dari tanggal 18 Desember – 8 Januari 2024. Angkutan Laut Nataru 2023-2024 diprediksi arus penumpang akan naik 25% dibanding jumlah tahun lalu. Sedangkan untuk Posko Terpadu, KSOP Utama Tanjung Priok bekerja sama dengan PT Pelni dan PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dalam pengawasan debarkasi dan embarkasi penumpang. Kepala KSOP juga menegaskan berbagai langkah strategis dan kolaboratif telah ditingkatkan sebagai upaya bersama untuk memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban angkutan laut selama periode musim liburan Nataru 2023-2024 di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

B. Kegiatan Operasional

1. Dharma Wanita Persatuan KSOP Utama Tanjung Priok

Dharma Wanita Persatuan KSOP Utama Tanjung Priok mengadakan pertemuan rutin dan memperkenalkan Ketua baru, Ibu Lita Takwim.

Dalam sambutannya, Ibu Lita menyoroti penyesuaian DWP pasca penyatuan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Organisasi ini fokus membentuk kembali menjadi struktur DWP Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dengan keyakinan bahwa terbentuknya struktur dapat mendukung kelancaran organisasi. Program terdekat DWP adalah menjadi tuan rumah Paguyuban Dharma Wanita Persatuan UPT Perhubungan Laut DKI Jakarta, direncanakan pada Desember 2023. Langkah jangka panjang melibatkan pertemuan rutin dan arisan, serta upaya mengajak seluruh anggota, khususnya istri pejabat dan pegawai, untuk aktif dalam DWP sebagai bagian internal dari Kantor KSOP Utama Tanjung Priok. Pertemuan berikutnya diawal tahun 2024 akan difokuskan pada penyusunan program tahunan, sementara kegiatan bersama PAUD binaan juga akan diteruskan. Pertemuan rutin ini berlangsung pada 17 November 2023, di ruang rapat buritan Kantor KSOP Utama Tanjung Priok.

2. Sertifikasi ISO 9001:2015

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dipimpin oleh Ihsan Maskuri selaku auditor eksternal dari PT. LRQA Business Assurance and Inspection Services Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 30 November s.d. 01 Desember 2023. Fokus audit eksternal ini adalah untuk melihat kembali apakah ada perubahan terhadap sertifikasi maupun system manajemen yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok setelah penggabungan dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Lalu melakukan verifikasi terhadap system manajemen secara berkelanjutan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok serta melakukan review terhadap efektifitas tindakan pencegahan atas temuan ketidaksesuaian sebelumnya. Dengan dilakukannya Audit Eksternal ini

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015.

3. Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melaksanakan Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018, (15/12) Auditor dari Badan Sertifikasi NQA, A. Maufur Wijaya, memimpin kegiatan tersebut. Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, ikut serta bersama pejabat struktural dan staf. Dalam pelaksanaan audit, semua aspek manajemen lingkungan (ISO 14001:2015) dan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (ISO 45001:2018) dievaluasi secara teliti. Seluruh proses, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan standar tersebut diperiksa untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya. Hasil dari audit sertifikasi menunjukkan bahwa tidak ditemukan temuan dengan kategori major. Kantor KSOP Utama Tanjung Priok telah memenuhi standar ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 dengan beberapa masukan dan saran dari Auditor untuk diperbaiki dan dilengkapi. Dengan hasil ini, Kantor KSOP Utama Tanjung Priok telah direkomendasikan untuk mendapatkan kelulusan audit sertifikasi, mengukuhkan komitmen terhadap lingkungan dan kesejahteraan pada lingkungan kerja.



BAB III

BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN;



I. PROGRAM

A. Kegiatan Operasional

1. Giat Keselamatan Maritim
2. Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan dan Penindakan

II. REALISASI

A. Kegiatan Operasional

1. Giat Keselamatan Maritim

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok M. Takwim Masuku bersama Pejabat Struktural meninjau langsung area disekitar Pelabuhan Tanjung Priok, pada Jumat (22/12). Kegiatan Patroli ini dimulai dari Dermaga Arsa, Dermaga Kresek, New Priok Container Terminal One (NPCT I) dan sekitarnya. Kegiatan berlangsung menggunakan kapal RIB R 01 milik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, giat patroli ini tujuan untuk memastikan lalu lintas pelayaran dalam kondisi aman dan lancar dalam proses sandar maupun keberangkatan kapal dari dermaga-dermaga di wilayah sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Laporan Data Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan dan Penindakan

Tabel II.1



NO	URAIAN	Okt sd Des 2023
1.	PENGELUARAN SURAT PERSETUJUAN	5.611 kapal
2.	BERLAYAR	
	KAPAL MASUK	
	- Kapal bendera RI	4.638 kapal
	- Kapal bendera asing	997 kapal
3.	KAPAL KELUAR	
	- Kapal bendera RI	4.628 kapal
	- Kapal bendera asing	983 kapal
4.	PEMERIKSAAN PORT STATE CONTROL (PSC)	
	- Inspection	101 kapal
	- Detention	3 kapal
	- Pemeriksaan kapal bendera RI yang berlayar ke Luar Negeri	4 kapal
5.	KAPAL MUAT <i>ONDECK</i> / MUAT GELADAK	
	a. <i>Ondeck</i> / muat geladak	158 kapal
6.	SPKK	
	a. Persetujuan Seatrial Kapal	11 kapal
	b. Persetujuan Orang Naik Keatas Kapal	11 kapal

Tabel II.2

NO	URAIAN	Oktober sd Desember 2023
----	--------	--------------------------



1.	Surat Persetujuan olah Gerak (SPOG) online	6.869 surat
2.	SPOG Manual	32 surat
3.	SPOG Berkala	304 surat
4.	SPOG Alur Nusantara	710 surat
5.	Surat Persetujuan Sandar Haluan Darat	83 surat
6.	Kegiatan Immobilisasi	21 surat
7.	Surat Persetujuan Sandar Beaching Kegiatan	140 surat
8.	Kapal Drill Life Boat	12 surat
9.	Kegiatan Kapal Penebalan Marka Garis Muat Surat	0 surat
10.	Persetujuan Sandar Overstake	14 surat

BAB IV

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan

I. PROGRAM

A. Kegiatan Pemerintahan

2. Rapat koordinasi dengan instansi pemerintah dan stakeholder di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok
3. Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelabuhan pada Terminal JICT periode Triwulan III Tahun 2023

B. Kegiatan Operasional

II. REALISASI

A. Kegiatan Pemerintahan

1. untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kantor KSOP Utama Tanjung Priok menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah dan stakeholder di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu (13/12). Berdasarkan pada pengalaman dari tahun sebelumnya, diprediksi akan terjadi kenaikan penumpang pada masa Angkutan Laut Nataru dikarenakan liburan anak sekolah, liburan akhir tahun serta hari besar agama, dan berlalunya masa pandemi Covid-19. Dalam sambutannya, Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, S.T., M.MT., rapat persiapan Angkutan Laut Nataru dilaksanakan untuk memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laik laut dan bahu membahu dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Dirjen Hubla juga memerintahkan akan diadakan posko pemantauan di 264 Pelabuhan Indonesia mulai tanggal 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. Untuk itu diharapkan seluruh stakeholder terkait dan para Nakhoda agar selalu memantau prakiraan cuaca, mengingat Nataru kerap bersamaan dengan cuaca ekstrim. Dan juga perusahaan pelayaran diminta untuk dapat mengupdate info terkini jadwal kedatangan/keberangkatan kapal baik dari pelabuhan maupun media sosial masing-masing.
2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melaksanakan Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelabuhan pada

Terminal JICT periode Triwulan III Tahun 2023 pada hari Kamis (28/12). Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan, pengoperasian, kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta mengetahui kapasitas produksi pelabuhan secara realtime dan presisi sebagai acuan untuk membuat kebijakan dan standarisasi di bidang pelabuhan. Bagi pemerintah, evaluasi ini dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah serta untuk mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan. Sedangkan bagi pengusaha, evaluasi ini berguna untuk kelancaran pelayanan dan mendapatkan informasi tentang validasi waktu ETA dan ETD yang tepat, serta memperlancar bisnis perusahaan dengan terteranya informasi pelabuhan dan operasi yang lebih terencana.

B. Kegiatan Operasional

BAB V

Bidang Perkapalan dan Kepelautan

L PROGRAM



A. Kegiatan Operasional

1. Uji Petik Kelaiklautan Kapal Persiapan Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun baru 2024
2. Kegiatan Operasional Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal;
3. Kegiatan Operasional Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran
4. Kegiatan Operasional Seksi Kepelautan.

II. REALISASI

A. Kegiatan Operasional

1. Dalam rangka persiapan angkutan laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah melaksanakan kegiatan Uji Petik pada Kapal KM. Nggapulu milik PT Pelayaran Nasional Indonesia. Kegiatan uji petik ini dipimpin oleh Bapak Rahmat Desrial, M.Mar.Eng. selaku Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran, bersama tim marine inspector serta Nahkoda Kapal KM. Nggapulu dan crewnya. Dalam uji petik ini, tim marine inspector memeriksa kondisi mesin kapal, alat pemadam api ringan (APAR), radio, hidrostatik reales, life jacket, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya. Hasil uji petik menunjukkan bahwa kapal KM. Nggapulu telah memenuhi standar keselamatan. Dengan demikian, Kapal KM. Nggapulu diharapkan siap melayani masyarakat yang akan mudik Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan aman dan nyaman.

2. Laporan Kegiatan Operasional Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal



NO	LAYANAN	QKT	NGV	DES	TOTAL
1	PENGUKURAN DALAM NEGERI	0	0	5	5
2	PENGUKURAN INTERNASIONAL	0	0	0	0
3	SURAT UKUR DALAM NEGERI	1	0	0	1
4	SURAT UKUR INTERNASIONAL	1	3	2	6
5	SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA	0	0	0	0
6	SURAT UKUR INTERNASIONAL SEMENTARA	4	0	3	7
7	PENGESAHAN DAFTAR UKUR	0	0	0	0
8	PENGGANTIAN BENDERA	2	0	2	4
9	GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL	2	7	32	41
10	GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL	32	9	2	43
11	GROSSE AKTA HIPOTEK KAPAL	16	25	16	57
12	PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL	0	0	10	10
13	E PAS KECIL	0	19	2	21
14	PAS BESAR	8	3	6	17
15	PAS BESAR SEMENTARA	0	0	1	1
16	SURAT LAUT SEMENTARA	28	29	31	88
17	PENGUKUHAN PAS KECIL	0	0	0	0
18	PENGUKUHAN PAS BESAR	22	6	12	40
19	PENGUKUHAN SURAT LAUT	20	20	14	54
20	ROYA	12	8	13	33
21	HALAMAN TAMBAHAN	10	10	15	35
22	STATUS HUKUM KAPAL	16	19	16	51
23	PENGHAPUSAN KAPAL	1	4	2	7
24	SERTIFIKAT GARIS MUAT SEMENTARA	0	0	3	3

3. Kegiatan Operasional Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran



NO	URAIAN	OKT	NOV	DES
A	PENGELUARAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL			
1	SERT. KESEL KONSTRUKSI KAPAL BARANG	57	62	82
2	SERT. KESEL PERLENGKAPAN KAPAL BARANG	52	54	71
3	SERT. KESEL RADIO KAPAL BARANG	52	47	67
4	SERT. KESEL KAPAL PENUMPANG	1	3	9
5	SERT. LAMBUNG TIMBUL DALAM NEGERI	5	5	-
6	SERT. KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI	-	-	-
7	SERT. BARANG BERBAHAYA (DG)	23	24	33
8	SERT. KESELAMATAN KAPAL DENGAN FUNGSI KHUSUS (SPS)	5	1	4
9	SERT. KESELAMATAN PENGEBORAN LEPAS PANTAI (MODU)	-	-	-
10	SERT. FITNESS (GASKIMIA)	5	1	1
11	SERT. PEMBEBASAN	-	-	-
12	SERT. KESELAMATAN NON KOMERSIL GT. 7 SD GT 35	7	4	3
13	SERT. SELAIN TERSEBUT DI ATAS	-	-	-
B	PENGELUARAN SERTIFIKAT PENCEMERAN			
1	SERT. IQPP	1	1	1
2	SERT. SNPP	14	13	16
3	SERT. NLS	-	-	-
4	SERT. IAPP	-	-	-
5	SERT. ISPP	-	-	-
6	SERT. SMC	5	11	6
7	SERT. DOC	1	-	2
8	SERT. CLC	1	1	1
9	SERT. AFS	22	27	24
10	SERT. BWMC (AIR BALLAST)	2	2	4
11	PERSETUJUAN CLEANING	-	-	-
C	ENDORS MARPOL	35	18	19

4. Kegiatan Operasional Seksi Kepelautan



NO	JENIS PELAYANAN	OKT	NOV	DES
1	PKL RI	2.435	2.529	1.956
2	PKL ASING	3.294	3.335	2.884
3	BUKU SIJIL ON	622	519	568
4	BUKU SIJIL OFF	399	403	341
5	SIJIL ON (Perusahaan)	5.476	5.733	4.684
6	SIJIL OFF (Perusahaan)	2.574	2.675	2.379
7	SIJIL OFF (Per/Org)	931	601	584
9	CREWLIST	347	377	287
10	CREWLIST PERWIRA JAGA	828	785	921
11	PERPANJANGAN BP	687	904	869
12	BUKU PELAUT BARU	564	423	457
13	PENGANTIAN BP	1.031	899	810
14	LEGALISIR BUKU PELAUT	-	-	-
15	MASA LAYAR	1.152	1.162	749
16	SAFE MANNING	23	20	24
17	PENCANTUMAN IJAZAH	6	10	60
18	PENGADUAN PELAUT	-	-	-
19	PERUBAHAN NAMA DAN IDENTITAS	58	52	-
	TOTAL	20.427	20.427	17.573

I.C Gambaran Umum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Bulan Oktober s.d Desember 2023

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud diatas telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1512/M.KT.01/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;

bahwa organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;

Penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing memerlukan beberapa faktor penting seperti Infrastruktur, Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Regulasi yang baik. Transportasi laut di Indonesia merupakan salah satu

bagian penting dari sistem transportasi yang melayani sebagian besar wilayah pulau – pulau yang tersebar luas di Indonesia dan juga penghubung antar Negara. Transportasi laut memegang peran penting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Laporan Tahunan ini berfungsi sebagai sarana dan penyampaian informasi tentang kegiatan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan merupakan pertanggungjawaban Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.

Laporan Tahunan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini disusun untuk menggambarkan informasi secara singkat namun komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah melebur antara Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada bulan Oktober Tahun 2023.

Gambar 1. 1

Peta lokasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok



Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terletak pada $6^{\circ}6'29''$ LS $106^{\circ}52'49''$ BT yang berada di area pelabuhan tersibuk di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintahan di bidang kebandaran, perkapalan dan jasa maritim dalam lingkungan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok bertugas untuk mengatur pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai standar nasional dan internasional.

Keberadaan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok memiliki peran vital dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Dimana Pelabuhan Tanjung Priok memiliki posisi yang begitu penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional yaitu sebagai pintu gerbang konektivitas ekonomi nasional dan internasional. Daerah lingkungan kerja yang termasuk dalam lingkup Kesyahbandaran Tanjung Priok meliputi perairan pelabuhan dengan batas-batas, yakni :

$06^{\circ} - 07' - 15''$ LS – $106^{\circ} - 49' - 18''$ BT,

$06^{\circ} - 04' - 00''$ LS – $106^{\circ} - 51' - 18''$ BT,

06° - 04' - 00" LS – 106° - 55' - 18" BT;

06° - 06' - 05" LS – 106° - 55' - 18" BT;

Gambar 1. 2

Peta Alur Pelayaran dan Zona Labuh di Pelabuhan Tanjung Priok



Setiap Instansi baik itu Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta memiliki tujuan Organisasi yang ingin dicapai oleh para pelaksana Instansi tersebut. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan dimaksud, diperlukan evaluasi dan program kerja yang berguna sebagai acuan didalam pencapaian tujuan dimaksud.

Untuk memperoleh gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbандaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok maka perlu disusun suatu laporan yang dapat memberikan uraian secara rinci tentang kegiatan yang menjadi Program Kerja, Realisasi dari Program Kerja dimaksud maupun kegiatan yang diprogramkan namun belum dapat dilaksanakan serta menyusun Program Kerja (PROKER) tahun berikutnya.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan data kegiatan dan data laporan selama Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbандaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Maksud dari penyusunan Laporan Tahunan ini adalah

sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diembannya serta menginformasikan keberhasilan yang telah dicapai dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.

Hal-hal yang belum dapat dicapai dan dilaksanakan perlu dianalisa apa yang menjadi kendala untuk dicarikan upaya untuk mengatasi masalah dan kendalanya, sedangkan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan perlu di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Tujuan disusunnya laporan tahunan ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan beban tugas yang diembannya, sekaligus dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana serta program kerja dan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pada tahun berikutnya.

2. TUGAS DAN FUNGSI

3. Tugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, serta sertifikasi kelaiklautan kapal.
4. Fungsi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
 - h. pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, pemeriksaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, dan penahanan kapal atas perintah pengadilan;
 - i. pelaksanaan pengaturan, penyediaan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pengawasan penggunaan daerah lingkungan

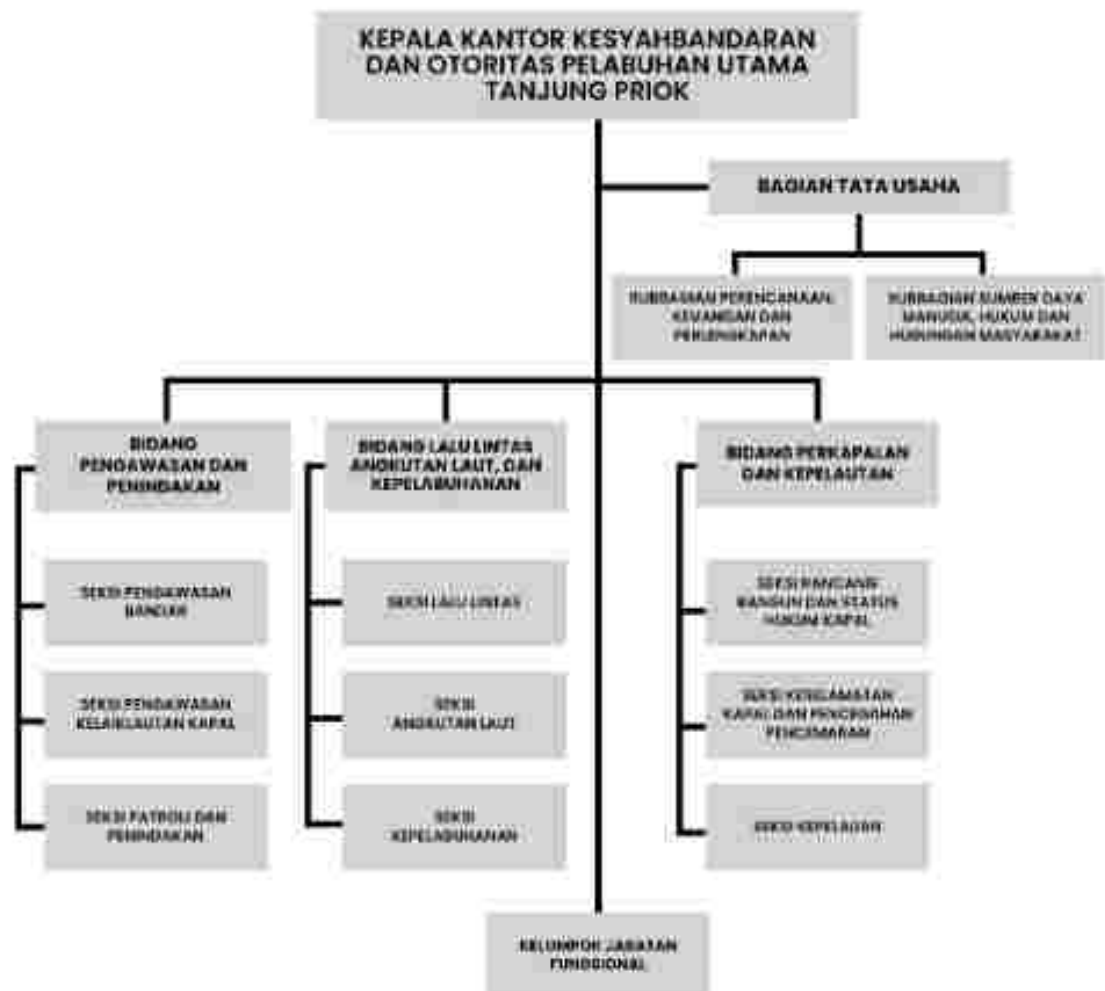
- kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal dan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- j. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut;
 - l. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal serta penyijilan awak kapal;
 - m. penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
 - n. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama digambarkan sebagai berikut

Gambar III.1

Struktur Organisasi



Susunan organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, terdiri atas:

- 5) Bagian Tata Usaha;
- 6) Bidang Pengawasan dan Penindakan;
- 7) Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan;
- 8) Bidang Perkapalan dan Kepelautan;



5. BAGIAN TATA USAHA

C. Tugas Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

D. Fungsi Bagian Tata Usaha:

- 4) penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 5) penyiapan bahan ketatausahaan, kerumahtanggaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- c) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- d) Subbagian Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

3) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan.

4) Subbagian Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan, kerumahtanggaan, urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.

6. BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

C. TUGAS BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, pemeriksaan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan penahanan kapal atas perintah pengadilan.

D. FUNGSI BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN:

4. pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta barang curah padat, barang khusus, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
5. pengawasan kelaiklautan kapal, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, pemeriksaan kapal berbendera Indonesia dan pemeriksaan kapal asing, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dan surat persetujuan berlayar; dan
6. pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan, penahanan kapal atas perintah pengadilan, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Bidang Pengawasan dan Penindakan Terdiri Atas

- a. Seksi Pengawasan Bandar;
- b. Seksi Pengawasan Kelaiklautan Kapal; dan
- c. Seksi Patroli dan Penindakan.

4) Seksi Pengawasan Bandar

mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta barang curah padat, barang khusus, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi

5) Seksi Pengawasan Kelaiklautan Kapal

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dan surat persetujuan berlayar

6) Seksi Patroli dan Penindakan

mempunyai tugas melakukan pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan, penahanan kapal atas perintah pengadilan, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/ SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan

7. BIDANG LALU LINTAS, ANGKUTAN LAUT, DAN KEPELABUHANAN

A. TUGAS

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah - lingkungan kepentingan pelabuhan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan

melalui pemanduan kapal dan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, serta pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran.

B. FUNGSI

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

4. pengawasan dan pengendalian trayek angkutan laut dalam negeri, pelayaran rakyat, angkutan laut luar negeri dan angkutan laut khusus;
5. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait serta evaluasi tarif usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait; dan
6. penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan kelancaran arus barang, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan rencana induk pelabuhan, penyusunan dan pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri Perhubungan atas penggunaan perairan dan/atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan dan evaluasi tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan Laut; dan

c. Seksi Kepelabuhanan.

4) Seksi Lalu Lintas;

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian trayek angkutan laut dalam negeri, pelayaran rakyat, angkutan laut luar negeri dan angkutan laut khusus.

5) Seksi Angkutan Laut; dan

Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait serta evaluasi tarif usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait.

6) Seksi Kepelabuhanan.

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengaturan, pengawasan dan penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan kelancaran arus barang, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan rencana induk pelabuhan, penyusunan dan pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri Perhubungan atas penggunaan perairan dan/atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan dan evaluasi tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.



8. BIDANG PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

C. TUGAS

melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal serta penyijilan awak kapal.

D. FUNGSI

4. penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau pengujian, pengesahan, penerbitan sertifikasi di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal, pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran kapal serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal;

5. penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau audit penerbitan sertifikasi di bidang keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal; dan
 6. penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan dan penyijilan awak kapal.
- Bidang Perkapalan dan Kepelautan terdiri atas:
- a. Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal;
 - b. Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran; dan
 - c. Seksi Kepelautan.
- 4) Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau pengujian, pengesahan, penerbitan sertifikasi di bidang rancang bangun, stabilitas dan garismuat kapal, pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran kapal serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.
- 5) Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan dan/atau audit penerbitan sertifikasi di bidang keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal.
- 6) Seksi Kepelautan
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan dan penyijilan awak kapal. Di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



4. KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 333 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 56 orang Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNP) sebagai berikut:

E. APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1. Berdasarkan Golongan

Jumlah Personil yang ada di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat dalam Tabel I.1.



Tabel I.1
Personil Menurut Golongan

NO	Golongan	A	B	C	D	JUMLAH
1	Golongan IV	20	3	-	1	24
2	Golongan III	36	93	78	67	274
3	Golongan II	2	7	3	20	32
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	CPNS					3
6	PPPK					5
Total						338

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan desember 2023)

2. Berdasarkan Pendidikan Umum

Sebaran pendidikan personil pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat pada Tabel IV. 2.

Tabel I. 2
Personil Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT IJAZAH	JUMLAH



1	Doktor (S3)	1
2	Magister (S2)	46
3	Sarjana (S1)	108
4	Diploma 4 (D4)	18
5	Diploma 3 (D3)	32
6	SLTA	122
7	SLTP	11
8	SD	0
	Total	338

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan Desember 2023)

3. Menurut Jenis Kelamin

Pembagian jenis kelamin personil pada Kantor Kesyahbandara Utama Tanjung Priok, seperti pada tabel 1.5 :

Table 1.5.
personil berdasarkan jenis kelamin :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	LAKI - LAKI	271	



2	PEREMPUAN	67	
	TOTAL	338	

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan desember 2023)

F. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

4. Berdasarkan Pendidikan Umum

Sebaran pendidikan Umum personil Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dilihat pada Tabel I. 6.

Tabel I. 6.

Personil PPNPN Menurut Ijazah

NO	TINGKAT IJAZAH	JUMLAH
1	Sarjana (S1)	14
2	D4	3
3	D3	1
4	SLTA	27
5	SLTP	7
6	SD	4

(sumber data urusan kepegawaian sampai dengan desember 2023)

5. KEUANGAN KANTOR KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK

G. ANGGARAN :

Jumlah Anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 bulan November sampai dengan Desember 2023 seperti pada tabel I.8

Tabel I .8

Anggaran yang tersedia dan realisasinya



TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
2023 Januari s/d Oktober	57.764.560.000	57.363.658.771	400.901.229

H. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Jumlah Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun Anggaran 2023 seperti pada tabel I.9

Tabel I. 9

Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
s/d Oktober 2023



No	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI Sd Oktober 2023 (Rp)	Persentase
1	Penerimaan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	14.178.678.000	11.544.113.757	81 %
2	Penerimaan Jasa Kenavigasian	8.711.452.000	6.981.150.892	80 %

1. DATA BARANG MILIK NEGARA

Tabel I. 10
Data Kendaraan Dinas dan Kapal Negara Patroli
s/d Desember 2023

NO	Jenis Barang	Volume	Satuan	Keterangan
----	--------------	--------	--------	------------



1	Kendaraan Dinas Roda Empat	23	Unit	
2	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Unit	
3	Kendaraan Dinas Roda 2	64	Unit	
4	Kapal Negara Patroli Kelas 3	1	Unit	
5	Kapal Negara Patroli Kelas 4	1	Unit	
6	Kapal Negara Patroli Kelas 5	2	Unit	
7	Kapal Rigid Inflatable Boats (RIB)	1	Unit	

BAB II

BAGIAN TATA USAHA

III. PROGRAM

C. Kegiatan Pemerintahan

1. Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial
2. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
3. Forum Kehumasan *Coffe Morning*
4. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tingkat Wilayah

UAPPA/B-W SEMESTER II TA 2023

5. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulan November 2023
 6. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 7. Jumpa Pers Penyelenggaraan Angkutan Laut NATARU 2023-2024
- D. Kegiatan Operasional
1. Pertemuan Rutin Dharma Wanita KSOP Utama Tanjung Priok
 2. Sertifikasi ISO 9001:2015
 3. Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018

IV. REALISASI

C. Kegiatan Pemerintahan

1. Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial

bertempat di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial dalam rangka dalam rangka Evaluasi dan Penyusunan Laporan PPID, pada Senin Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Media Sosial Tahun 2023 diikuti oleh personel Kehumasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok serta Unit Pelaksana (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DKI Jakarta, dengan jumlah $\pm$ 50 orang. Kegiatan ini merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas kami sebagai badan publik yang dituntut untuk senantiasa memberikan informasi yang seluas-luasnya tanpa ruang dan sekat yang membatasi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru sehingga meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2023

Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2023 di De Java Hotel, Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh para pegawai dan pejabat struktural Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Kegiatan ini dimulai dengan sambutan oleh Bapak Ir. Subagiyo, M.T., selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dalam sambutannya, Beliau mengungkapkan maksud dari kegiatan ini, yaitu sebagai persiapan untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) ditingkat Eselon I yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun laporan BMN di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang lebih akuntabel, komprehensif, efektif, dan efisien. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi di seluruh bidang dan bagian dalam lingkungan Kantor KSOP Utama Tanjung Priok. Kegiatan ini berlangsung pada 1 s.d. 3 November 2023 dan juga melibatkan narasumber melalui daring online, Bapak Muchtar Fathoni dari Kanwil DJKN DKI Jakarta. Dengan dilaksanakannya acara Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun Anggaran 2023, diharapkan bahwa laporan BMN yang disusun akan memenuhi standar akuntabilitas dan efisiensi.

3. Forum Kehumasan UPT DKI Jakarta Coffee Morning

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok mengadakan Forum Kehumasan UPT DKI Jakarta Coffee Morning, dilakukan untuk upaya memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor KSOP Utama Tanjung Priok. Kegiatan ini merupakan langkah awal agar meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Forum Kehumasan ini diselenggarakan pada tanggal 15 November 2023, di Orchardz Hotel Industri. Selain itu tujuan diadakannya acara ini, untuk menyambut kepemimpinan baru, yaitu M. Takwin Masuku menjabat sebagai Kepala Kantor dan Ir. Subagiyo yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas

Perhubungan. Harapan dari kegiatan ini bahwa sinergi yang dibangun bersama dapat meningkatkan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan dan tugas yang akan datang. Dengan Memupuk harmonisasi dan memperkuat hubungan antar instansi demi peningkatan aspek keamanan dan keselamatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

4. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tingkat Wilayah UAPPA/B-W SEMESTER II TA 2023,

Kantor KSOP Utama Tanjung Priok telah Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tingkat Wilayah UAPPA/B-W SEMESTER II TA 2023, dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 30 November hingga 2 Desember 2023 bertempat di Swiss-Bel Hotel Bogor. Kegiatan ini dibuka oleh M. Takwim Masuku selaku Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok melalui daring pada Jum'at. Dalam sambutannya, M. Takwim Masuku menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi data PNBP penting untuk dilakukan guna memastikan keakuratan data PNBP yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan. M. Takwim Masuku juga berharap bahwa kegiatan ini dapat dijadikan momentum bagi para operator aplikasi untuk menjadi operator yang profesional, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja PNBP di Wilayah Koordinasi DKI Jakarta. Selain itu, Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari KPPN Jakarta IV, yaitu Nazif Azhari dan Andika Praba melalui daring. Kegiatan ini diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah Koordinasi DKI Jakarta, yaitu Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Kepala KSOP Kelas II Marunda, Kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa, Kantor BTKP Tanjung Priok, Kantor BKIP Tanjung Priok, Kantor KSOP Kelas IV Muara Angke dan Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu.

5. Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulan November 2023

Kantor KSOP Utama Tanjung Priok Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulan November 2023 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 07 Desember hingga 09 Desember 2023 bertempat di Swiss-Belboutique Yogyakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Lusi Andayani, S.T., M.M.Tr. pada Kamis, Kepala Bagian Tata Usaha Lusi Andayani menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi PNBP ini merupakan acara rutin yang di gelar setiap bulannya oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang melakukan rekonsiliasi dengan PT Pelindo serta PT Pertamina. Nantinya hasil dari Rekonsiliasi hari ini akan dituangkan dalam Berita Acara yang akan ditandatangani oleh Para Pihak. Lusi Andayani Saya berharap rekonsiliasi ini dapat berjalan lancar dengan terpenuhinya data dukung yang lengkap serta transparansi data dari berbagai pihak dalam rekonsiliasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas rekonsiliasi. Oleh sebab itu diharapkan komitmen dan kerja keras berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung upaya optimalisasi PNBP dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi maupun di lapangan.

6. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) untuk Semester II Tahun 2023

KSOP utama Tanjung Priok melaksanakan kegiatan koordinasi persiapan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) untuk Semester II

Tahun 2023 (13-16/12), Bogor. Kegiatan ini bertujuan utama melakukan penyesuaian dan pencocokan data transaksi keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) selama Semester II Tahun 2023. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan integritas dan ketepatan data keuangan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di tingkat wilayah, khususnya pada unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah. Dengan melakukan penyesuaian dan pencocokan data, diharapkan dapat tercipta laporan keuangan yang lebih akurat dan reliabel. Kegiatan ini memiliki fokus khusus pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terutama pada unit pelaksana teknis wilayah koordinasi DKI Jakarta. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, komprehensifitas, efektivitas, dan efisiensi laporan keuangan. Dengan memastikan bahwa data transaksi keuangan telah disesuaikan dengan baik, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar tinggi dalam hal integritas dan keakuratan informasi keuangan. Melalui kerjasama dan koordinasi antarinstansi dalam kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai efisiensi operasional serta pemahaman yang lebih baik terkait kondisi keuangan di tingkat wilayah, memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

7. Jumpa Pers Penyelenggaraan Angkutan Laut NATARU 2023-2024

Dalam rangka kesiapan menghadapi musim Natal 2023 dan menyambut Tahun Baru 2024 (NATARU), Karhor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menggelar kegiatan Jumpa Pers Penyelenggaraan Angkutan Laut NATARU 2023-2024 di Pelabuhan Tanjung Priok bersama instansi pemerintah dan stakeholder pada hari Rabu, Narasumber Jumpa Pers yang berlangsung di Museum Maritim Indonesia, selain Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, S.T., M.MT. juga menghadirkan perwakilan dari Polres Pelabuhan Tanjung

Priok, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, dan PT Peln DKI Jakarta. Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, dalam paparannya menyampaikan upaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan angkutan laut, pihak Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melakukan uji petik terhadap 14 kapal yang akan beroperasi pada musim Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, serta membuka Posko Terpadu di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dari tanggal 18 Desember – 8 Januari 2024. Angkutan Laut Nataru 2023-2024 diprediksi arus penumpang akan naik 25% dibanding jumlah tahun lalu. Sedangkan untuk Posko Terpadu, KSOP Utama Tanjung Priok bekerja sama dengan PT Peln dan PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dalam pengawasan debarkasi dan embarkasi penumpang. Kepala KSOP juga menegaskan berbagai langkah strategis dan kolaboratif telah ditingkatkan sebagai upaya bersama untuk memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban angkutan laut selama periode musim liburan Nataru 2023-2024 di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

D. Kegiatan Operasional

1. Dharma Wanita Persatuan KSOP Utama Tanjung Priok

Dharma Wanita Persatuan KSOP Utama Tanjung Priok mengadakan pertemuan rutin dan memperkenalkan Ketua baru, Ibu Lita Takwim. Dalam sambutannya, Ibu Lita menyoroti penyesuaian DWP pasca penyatuan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Organisasi ini fokus membentuk kembali menjadi struktur DWP Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dengan keyakinan bahwa terbentuknya struktur dapat mendukung kelancaran organisasi. Program terdekat DWP adalah menjadi tuan rumah Paguyuban Dharma Wanita Persatuan UPT Perhubungan Laut DKI Jakarta, direncanakan pada Desember 2023. Langkah jangka panjang melibatkan

pertemuan rutin dan arisan, serta upaya mengajak seluruh anggota, khususnya istri pejabat dan pegawai, untuk aktif dalam DWP sebagai bagian internal dari Kantor KSOP Utama Tanjung Priok. Pertemuan berikutnya diawal tahun 2024 akan difokuskan pada penyusunan program tahunan, sementara kegiatan bersama PAUD binaan juga akan diteruskan. Pertemuan rutin ini berlangsung pada 17 November 2023, di ruang rapat buritan Kantor KSOP Utama Tanjung Priok.

2. Sertifikasi ISO 9001:2015

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dipimpin oleh Ihsan Maskuri selaku auditor eksternal dari PT. LRQA Business Assurance and Inspection Services Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 30 November s.d. 01 Desember 2023. Fokus audit eksternal ini adalah untuk melihat kembali apakah ada perubahan terhadap sertifikasi maupun system manajemen yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok setelah penggabungan dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Lalu melakukan verifikasi terhadap system manajemen secara berkelanjutan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok serta melakukan review terhadap efektifitas tindakan pencegahan atas temuan ketidaksesuaian sebelumnya. Dengan dilakukannya Audit Eksternal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015.

3. Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melaksanakan Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO

14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018. (15/12) Auditor dari Badan Sertifikasi NQA, A. Maufur Wijaya, memimpin kegiatan tersebut. Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, ikut serta bersama pejabat struktural dan staf. Dalam pelaksanaan audit, semua aspek manajemen lingkungan (ISO 14001:2015) dan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (ISO 45001:2018) dievaluasi secara teliti. Seluruh proses, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan standar tersebut diperiksa untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya. Hasil dari audit sertifikasi menunjukkan bahwa tidak ditemukan temuan dengan kategori major. Kantor KSOP Utama Tanjung Priok telah memenuhi standar ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 dengan beberapa masukan dan saran dari Auditor untuk diperbaiki dan dilengkapi. Dengan hasil ini, Kantor KSOP Utama Tanjung Priok telah direkomendasikan untuk mendapatkan kelulusan audit sertifikasi, mengukuhkan komitmen terhadap lingkungan dan kesejahteraan pada lingkungan kerja.



BAB III

BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN;

III. PROGRAM

B. Kegiatan Operasional

1. Giat Keselamatan Maritim
2. Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan dan Penindakan

IV. REALISASI

A. Kegiatan Operasional



1. Giat Keselamatan Maritim

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok M. Takwim Masuku bersama Pejabat Struktural meninjau langsung area disekitar Pelabuhan Tanjung Priok, pada Jumat (22/12). Kegiatan Patroli ini dimulai dari Dermaga Arsa, Dermaga Kresek, New Priok Container Terminal One (NPCT I) dan sekitarnya. Kegiatan berlangsung menggunakan kapal RIB R 01 milik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, giat patroli ini tujuan untuk memastikan lalu lintas pelayaran dalam kondisi aman dan lancar dalam proses sandar maupun keberangkatan kapal dari dermaga-dermaga di wilayah sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Laporan Data Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan dan Penindakan

Tabel II.1

NO	URAIAN	Okt sd Des 2023
----	--------	--------------------



1.	PENGELUARAN SURAT PERSETUJUAN	5.611 kapal
2.	BERLAYAR	
	KAPAL MASUK	
	- Kapal bendera RI	4.638 kapal
	- Kapal bendera asing	997 kapal
3.	KAPAL KELUAR	
	- Kapal bendera RI	4.628 kapal
	- Kapal bendera asing	983 kapal
4.	PEMERIKSAAN PORT STATE CONTROL (PSC)	
	- Inspection	101 kapal
	- Detention	3 kapal
	- Pemeriksaan kapal bendera RI yang berlayar ke Luar Negeri	4 kapal
5.	KAPAL MUAT ONDECK / MUAT GELADAK	158 kapal
6.	a. Ondeck / muat geladak	
	SPKK	11 kapal
	c. Persetujuan Seatrial Kapal	11 kapal
	d. Persetujuan Orang Naik Keatas Kapal	

Tabel II.2

NO	URAIAN	Oktober sd Desember 2023
----	--------	--------------------------



1.	Surat Persetujuan olah Gerak (SPOG) online	6.869 surat
2.	SPOG Manual	32 surat
3.	SPOG Berkala	304 surat
4.	SPOG Alur Nusantara	710 surat
5.	Surat Persetujuan Sandar Haluan Darat	83 surat
6.	Kegiatan Immobilisasi	21 surat
7.	Surat Persetujuan Sandar Beaching Kegiatan	140 surat
8.	Kapal Drill Life Boat	12 surat
9.	Kegiatan Kapal Penebalan Marka Garis Muat Surat	0 surat
10.	Persetujuan Sandar Overstake	14 surat

BAB IV

Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan

III. PROGRAM

C. Kegiatan Pemerintahan

2. Rapat koordinasi dengan instansi pemerintah dan stakeholder di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok
3. Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelabuhan pada Terminal JICT periode Triwulan III Tahun 2023

D. Kegiatan Operasional

IV. REALISASI

C. Kegiatan Pemerintahan

3. untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kantor KSOP Utama Tanjung Priok menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah dan stakeholder di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu (13/12). Berdasarkan pada pengalaman dari tahun sebelumnya, diprediksi akan terjadi kenaikan penumpang pada masa Angkutan Laut Nataru dikarenakan liburan anak sekolah, liburan akhir tahun serta hari besar agama, dan berlalunya masa pandemi Covid-19. Dalam sambutannya, Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, S.T., M.MT., rapat persiapan Angkutan Laut Nataru dilaksanakan untuk memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laik laut dan bahu membahu dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Dirjen Hubla juga memerintahkan akan diadakan posko pemantauan di 264 Pelabuhan Indonesia mulai tanggal 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. Untuk itu diharapkan seluruh stakeholder terkait dan para Nakhoda agar selalu memantau prakiraan cuaca, mengingat Nataru kerap bersamaan dengan cuaca ekstrim. Dan juga perusahaan pelayaran diminta untuk dapat mengupdate info terkini jadwal kedatangan/keberangkatan kapal baik dari pelabuhan maupun media sosial masing-masing.
4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melaksanakan Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelabuhan pada

Terminal JICT periode Triwulan III Tahun 2023 pada hari Kamis (28/12). Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan, pengoperasian, kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta mengetahui kapasitas produksi pelabuhan secara realtime dan presisi sebagai acuan untuk membuat kebijakan dan standarisasi di bidang pelabuhan. Bagi pemerintah, evaluasi ini dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah serta untuk mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan. Sedangkan bagi pengusaha, evaluasi ini berguna untuk kelancaran pelayanan dan mendapatkan informasi tentang validasi waktu ETA dan ETD yang tepat, serta memperlancar bisnis perusahaan dengan terteranya informasi pelabuhan dan operasi yang lebih terencana.

D. Kegiatan Operasional

BAB V

Bidang Perkapalan dan Kepelautan

III. PROGRAM

B. Kegiatan Operasional

5. Uji Petik Kelaiklautan Kapal Persiapan Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun baru 2024
6. Kegiatan Operasional Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal;
7. Kegiatan Operasional Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran
8. Kegiatan Operasional Seksi Kepelautan.

IV. REALISASI

B. Kegiatan Operasional

5. Dalam rangka persiapan angkutan laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah melaksanakan kegiatan Uji Petik pada Kapal KM. Nggapulu milik PT Pelayaran Nasional Indonesia. Kegiatan uji petik ini dipimpin oleh Bapak Rahmat Desrial, M.Mar.Eng. selaku Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran, bersama tim marine inspector serta Nahkoda Kapal KM. Nggapulu dan crewnya. Dalam uji petik ini, tim marine inspector memeriksa kondisi mesin kapal, alat pemadam api ringan (APAR), radio, hidrostatik reales, life jacket, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya. Hasil uji petik menunjukkan bahwa kapal KM. Nggapulu telah memenuhi standar keselamatan. Dengan demikian, Kapal KM. Nggapulu diharapkan siap melayani masyarakat yang akan mudik Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan aman dan nyaman.

6. Laporan Kegiatan Operasional Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal



NO	LAYANAN	QKT	NGV	DES	TOTAL
1	PENGUKURAN DALAM NEGERI	0	0	5	5
2	PENGUKURAN INTERNASIONAL	0	0	0	0
3	SURAT UKUR DALAM NEGERI	1	0	0	1
4	SURAT UKUR INTERNASIONAL	1	3	2	6
5	SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA	0	0	0	0
6	SURAT UKUR INTERNASIONAL SEMENTARA	4	0	3	7
7	PENGESAHAN DAFTAR UKUR	0	0	0	0
8	PENGGANTIAN BENDERA	2	0	2	4
9	GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL	2	7	32	41
10	GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL	32	9	2	43
11	GROSSE AKTA HIPOTEK KAPAL	16	25	16	57
12	PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL	0	0	10	10
13	E PAS KECIL	0	19	2	21
14	PAS BESAR	8	3	6	17
15	PAS BESAR SEMENTARA	0	0	1	1
16	SURAT LAUT SEMENTARA	28	29	31	88
17	PENGUKUHAN PAS KECIL	0	0	0	0
18	PENGUKUHAN PAS BESAR	22	6	12	40
19	PENGUKUHAN SURAT LAUT	20	20	14	54
20	ROYA	12	8	13	33
21	HALAMAN TAMBAHAN	10	10	15	35
22	STATUS HUKUM KAPAL	16	19	16	51
23	PENGHAPUSAN KAPAL	1	4	2	7
24	SERTIFIKAT GARIS MUAT SEMENTARA	0	0	3	3

7. Kegiatan Operasional Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran



NO	URAIAN	OKT	NOV	DES
A	PENGELUARAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL			
1	SERT. KESEL KONSTRUKSI KAPAL BARANG	57	62	82
2	SERT. KESEL PERLENGKAPAN KAPAL BARANG	52	54	71
3	SERT. KESEL RADIO KAPAL BARANG	52	47	67
4	SERT. KESEL KAPAL PENUMPANG	1	3	9
5	SERT. LAMBUNG TIMBUL DALAM NEGERI	5	5	-
6	SERT. KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI	-	-	-
7	SERT. BARANG BERBAHAYA (DG)	23	24	33
8	SERT. KESELAMATAN KAPAL DENGAN FUNGSI KHUSUS (SPS)	5	1	4
9	SERT. KESELAMATAN PENGEBORAN LEPAS PANTAI (MODU)	-	-	-
10	SERT. FITNESS (GASKIMIA)	5	1	1
11	SERT. PEMBEBASAN	-	-	-
12	SERT. KESELAMATAN NON KOMERSIL GT. 7 SD GT 35	7	4	3
13	SERT. SELAIN TERSEBUT DI ATAS	-	-	-
B	PENGELUARAN SERTIFIKAT PENCEMERAN			
1	SERT. IQPP	1	1	1
2	SERT. SNPP	14	13	16
3	SERT. NLS	-	-	-
4	SERT. IAPP	-	-	-
5	SERT. ISPP	-	-	-
6	SERT. SMC	5	11	6
7	SERT. DOC	1	-	2
8	SERT. CLC	1	1	1
9	SERT. AFS	22	27	24
10	SERT. BWMC (AIR BALLAST)	2	2	4
11	PERSETUJUAN CLEANING	-	-	-
C	ENDORS MARPOL	35	18	19

8. Kegiatan Operasional Seksi Kepelautan



NO	JENIS PELAYANAN	OKT	NOV	DES
1	PKL RI	2.435	2.529	1.956
2	PKL ASING	3.294	3.335	2.884
3	BUKU SIJIL ON	622	519	568
4	BUKU SIJIL OFF	399	403	341
5	SIJIL ON (Perusahaan)	5.476	5.733	4.684
6	SIJIL OFF (Perusahaan)	2.574	2.675	2.379
7	SIJIL OFF (Per/Org)	931	601	584
9	CREWLIST	347	377	287
10	CREWLIST PERWIRA JAGA	828	785	921
11	PERPANJANGAN BP	687	904	869
12	BUKU PELAUT BARU	564	423	457
13	PENGANTIAN BP	1.031	899	810
14	LEGALISIR BUKU PELAUT	-	-	-
15	MASA LAYAR	1.152	1.162	749
16	SAFE MANNING	23	20	24
17	PENCANTUMAN IJAZAH	6	10	60
18	PENGADUAN PELAUT	-	-	-
19	PERUBAHAN NAMA DAN IDENTITAS	58	52	-
	TOTAL	20.427	20.427	17.573